

**PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN  
TEBANG DAN ANGKUT TEBU  
PADA PT. INDO LAMPUNG PERKASA**



**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Prasyarat  
Mencapai Derajat Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

**RUDIANTO, S.H.**

**B4B 002 156**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2004**

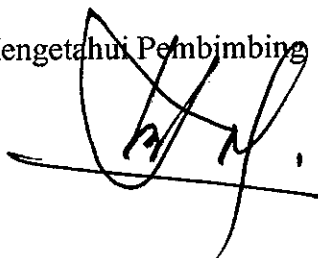
**PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN  
TEBANG DAN ANGKUT TEBU  
PADA PT. INDO LAMPUNG PERKASA**

**TESIS**

Oleh :  
RUDIANTO, S.H.  
B4B 002 156

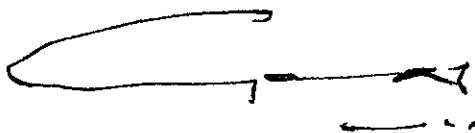
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 02 September 2004  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui Pembimbing



H. ACHMAD BUSRO, S.H, M.Hum.

Mengetahui  
Ketua Program Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

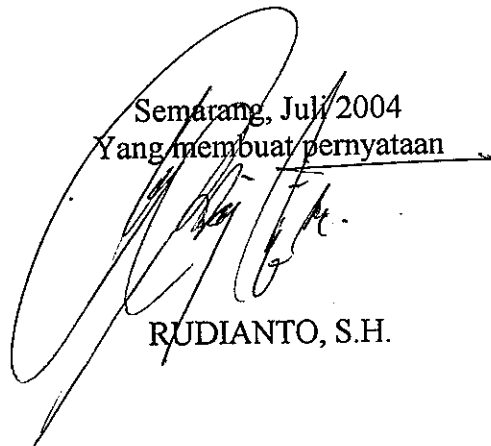


Prof. IGN. SUGANGGA, S.H.  
NIP. 130 359.063

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juli 2004  
Yang membuat pernyataan



RUDIANTO, S.H.

## **PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan tesis ini kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Bapak dan Mamakku, yang telah mendidik dan membelai dengan kasih sayang, Adik-adikku yang tercinta Wiwin, Toni dan Umi, Seorang yang tersayang Wiwik, semoga bersamamu hidupku lebih bermakna, para Guru dan Guru Besar, Staf Pengajar, Dosen, di mana kami menimba ilmunya, dan Almamater Universitas Diponegoro.*

*Segala Puji Syukur, terimakasih yang tidak terhingga.*

## ABSTRAKSI

Kemampuan suatu perseroan terbatas sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan permodalan perseroan tersebut, jika terdapat kemampuan yang terbatas secara teoritis tidak berarti mengurangi atau menghambat kemampuan mencari keuntungan semaksimal mungkin, ia sebagai subjek hukum badan diberikan hak dan kewenangan yang sama dengan subjek hukum manusia (biologis) untuk berhubungan dan bekerjasama dengan subjek hukum lain.

Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh PT. Indo Lampung Perkasa, adalah pendelegasian pekerjaan tebang dan angkut tebu kepada pihak lain. Langkah awal pengamanan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik, yaitu pemilihan pemborong yang berkualitas, kemudian dibuat pengawasan yang sangat ketat agar pekerjaan sesuai dengan target yang diharapkan.

Hal tersebutlah yang menjadi sebahagian latar belakang di dalam penulisan tesis ini yang menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, sedangkan sampel ditentukan secara purposive sampling, kemudian dari data-data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.

Tanggungjawab pemborong pekerjaan apabila wanprestasi dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu, biasanya tidak hanya berpengaruh pada pihak pemborong itu sendiri akan tetapi berpengaruh pada pihak-pihak tertentu di dalam pemberi pekerjaan, walaupun kerugian itu ditimbulkan oleh pihak pemborong pekerjaan dan dapat diminimalisir dengan pembayaran denda.

Jika terjadi force majeure di dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu, biasanya keadaan tersebut tidaklah menyebabkan denda dan penggantian kerugian, malah dapat menjadi alasan harga borongan pekerjaan yang diterima oleh pemborong pekerjaan menjadi lebih dari harga biasa.

Kemudian kompleksnya permasalahan proses tebang dan angkut tebu karena menyangkut ribuan manusia dengan latar belakang yang berbeda, juga proses tebang dan angkut tebu yang memerlukan kekhususan tertentu, tidak hanya format perjanjian pemborongan tebang dan angkut tebu yang baik diperlukan, tetapi pelaksanaan perjanjian pemborongan tebang dan angkut tebu yang tepat sangat diperlukan, artinya dimulai dari format perjanjian pemborongan tebang dan angkut tebu sebagai bukti pengamanan hukum hingga pelaksanaan pekerjaan tebang dan angkut tebu sebagai pengamanan produksi perusahaan.

**AGREEMENT ON JOB CONTRACT  
OF CUTTING AND DELIVERING OF SUGARCANE  
IN PT. INDO LAMPUNG PERKASA**

**ABSTRACT**

Capability of a company is highly influenced by the capital capacity of the company. If the capacity is limited theoretically it does not mean that it reduces or obstructs any ability in making benefit as maximal as possible. As a legal subject, it is attached the same rights and authority as the human being (biological) legal subject in order to build relationship to other legal subjects.

One of the partnership conducted by PT. Indo Lampung Perkasa is delegating the cutting job and delivering of sugar cane to other parties. The first anticipation step in order to maintain the good job is choosing high-qualified partner that will be controlled firmly so that the work runs perfectly.

Those mentioned above things are parts of the thesis background that are studied by juridical-empirical approach whereas data collecting methods are primary and secondary techniques. Sample is defined purposively. The gathered data are analysed quantitatively.

Any violation from the partner toward the agreement on the cutting and delivery works of sugar cane usually will not only affect the partner itself but also will affect certain parties connected to the employer, even though the loss is resulted from the partner and can be reduced by penalty payment.

If any force majeure persists in the cutting and/ or delivering of sugar cane activity, it does not result in any financial penalty or loss compensating payment in the contrary, it may be a reason to raise the working fund.

Concerning with complexity of cutting off and delivering of sugar cane problem that is derived from thousands of people differ in background, and also the cutting and delivering of sugar cane that needs specialisation; it is not only the good agreement format needed but also the appropriate application of the cutting and delivering of sugar cane work needed. It means that everything is commenced from the agreement of cutting and delivering of sugar cane format as a legal insurance proof to execution of the cutting and delivering of sugar cane as an insurance of company producing process.

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmannirrahim.**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan menyusun tesis ini, dengan segala keterbatasan dan ketiada keyakinan penulis dapat menyelesaikan studi ini jika bukan karena begitu besar rahmat yang dicurahkan oleh Allah SWT kepada hambanya ini yang dirinya pun merasa sangat jauh dari seorang hamba yang taat.

Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat dan tercinta Bapakku Ramelan dan Mamakku Suyati, adik-adikku Wiwin dan Iskandar Romli (Suami), Toni, Umi, serta keponakanku Abdullah Arief Rahman yang tersayang, atas dorongan dan doa-doanya demi kesuksesan penulis.

2. Prof. Ir. Eko Budiharjo, MSc, Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
4. Prof. IGN. Sugangga, S.H, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak H. Achmad Busro, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran, petunjuk dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak R. Suharto, S.H, M.Hum, Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
7. Bapak Erry Agus Priyono, S.H, M.Si, yang telah meluangkan waktu, guna memberikan bimbingan, saran, petunjuk dan pikirannya, dalam penyusunan tesis ini, semoga Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Amin.
8. Bapak Suradi, SH, M.Hum, Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.



9. Bapak RMJ. Koesmargono, S.H, M.Hum, Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Bapak I Gde AB Wiranata, S.H, M.H, yang bagi penulis adalah seorang Guru, Kawan, Sahabat, tempat penulis berkeluh kesah, berdiskusi, semoga dalam studi Doktoralnya diberikan jalan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
11. Bapak H. Ir. Faisal Anas, Direktur Site Plan PT. Indo Lampung Perkasa, yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
12. Bapak H. Muthohar D. Suharto, Manajer Harvesting PT. Indo Lampung Perkasa, yang telah meluangkan waktu membimbing, dan memperoleh data-data dalam penelitian ini.
13. Bapak H. Ir. Mujiono, Manajer Umum PT. Indo Lampung Perkasa, yang telah meluangkan waktu membimbing dan memperoleh data-data dalam penelitian ini.
14. Para Kontraktor tebang dan/atau angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa, yang telah meluangkan waktu guna penulis memperoleh data-data dalam penelitian ini.
15. Mas Agus dan Mbak Endah, yang telah memberikan tempat untuk mondok pada waktu penulis mencari data-data di PT. Indo Lampung Perkasa, Bapak Soejono dan Ibu Sriati, yang telah

banyak membantu, seluruh staf administrasi dan lapangan PT. Indo Lampung Perkasa, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan sebagai amal kebaikan, Amin.

16. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang,
17. Para Staf Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
18. Seorang yang semoga selalu memberi makna dalam kehidupan ini, semoga engkau selalu menjadi lentera di perjalanan hidupku, untuk menghabiskan sisa hidup sambil menunggu panggilan-Nya.
19. Buat rekan-rekan angkatan 2002, Mas Muh Mursidi, Mas Bambang, Bang Tamsil, Yudi, Wondo, Pak Eko, Mas Kojali, Bang Hertavi, Dorry, Mbak Maria Sofia, Mbak Indah, Mbak Emi dan semua Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga keberkahan dan keselamatan selalu menyertai kita.
20. Akhirnya buat sahabat-sahabatku Agung Santoso, A.Mk (Bungkek), Fardhi Setiawan, S.Km (Wawan), Agung Kurniawan, S.St (Popeye), Wasimen Hermanto, A.Md (Edo), Hartanto, S.E, dan Soni Widiyanto, A.Md (Temon), selama kebersamaan kita di Semarang semoga menjadi tali persaudaraan yang abadi.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya tesis ini.

Penulis memohon kepada Allah SWT, semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh imbalan yang tidak terhingga, Amin.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, untuk itu saran dan kritik yang bersifat memperbaiki selalu penulis harapkan.

Semarang, Juli 2004

Penulis

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Surat Perintah Kerja Kegiatan Borongan Tebang Losse Cane Pada Musim Giling Tahun 2004  
Nomor : 06/LC/HVT/V/2004, tanggal 25 April 2004.  
Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchtar.
- LAMPIRAN II : Surat Perintah Kerja Kegiatan Borongan Tebang Losse Cane Pada Musim Giling Tahun 2004  
Nomor : 001/LC/HVT/V/2004, tanggal 25 April 2004.  
Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwono.
- LAMPIRAN III : Surat Perintah Kerja Kegiatan Borongan Tebang Angkut Pada Musim Giling Tahun 2004  
Nomor : 23/BC/HVT/V/2004, tanggal 25 April 2004.  
Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryanto
- LAMPIRAN IV : Surat Perintah Kerja Kegiatan Borongan Tebang Angkut Pada Musim Giling Tahun 2004  
Nomor : 25/BC/HVT/V/2004, tanggal 25 April 2004.  
Kartu Tanda Penduduk atas nama Triyono
- LAMPIRAN V : Surat Perintah Kerja Kegiatan Borongan Angkut Pada Musim Giling Tahun 2004  
Nomor : 001/BC/HVT/V/2004, tanggal 25 April 2004.  
Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy
- LAMPIRAN VI : Analisis Burning Cane Of Delivery Daily Report Date : 15 June 2004 dan Analisis Burning Cane Of Delivery Weekly Report Week No : 7  
Period : 6 Up To 12 Juni 2004
- LAMPIRAN VII : Perjanjian Kerja Tebang Angkut Pada Musim

Giling Tahun 2002.

Nomor : 003/HVT/ILP/BC/III/2002, tanggal  
23 Maret 2002.

LAMPIRAN VIII : Perjanjian Kerja Borongan Tebang Pada Masa  
Giling Tahun 2002.  
Nomor : 023/HVT/ILP/LC/IV/2002, tanggal  
15 April 2002.

LAMPIRAN IX : Surat Keterangan Nomor : 073/ADM-  
ILP/VI/2004, Tanggal 26 Juni 2004.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
PESEMBAHAN .....	iv
ABSTRAKSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
 II. TINJAUAN PUSTAKA .....	 8
2.1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya .....	8
2.1.1. Pengertian Perjanjian .....	8
2.1.2. Macam-macam Perikatan .....	12
2.1.3. Asas-asas Hukum Perjanjian .....	21
2.1.4. Syarat Sahnya Perjanjian .....	25
2.1.5. Hapusnya Perjanjian .....	28
2.2. Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan .....	40
2.2.1. Unsur-unsur Perjanjian Pemborongan Pekerjaan .....	41
2.2.2. Bentuk Perjanjian Pemborongan Pekerjaan .....	45
2.2.3. Jenis Perjanjian Pemborongan Pekerjaan .....	45
2.2.4. Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan .....	49
2.3. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya .....	50
2.4. Force Majeure .....	55
2.5. Pekerjaan Penebangan dan Pengangkutan Tebu .....	57
2.6. Jenis Pemborong Pekerjaan Pada PT. Indo Lampung Perkasa .....	57
 III. METODE PENELITIAN .....	 59
3.1. Metode Pendekatan .....	59
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	60
3.2.1. Metode Pengumpulan Data Primer .....	60
3.2.2. Metode Pengumpulan Data Sekunder .....	61

3.3. Populasi, Teknik Sampling dan Responden .....	62
3.4. Analisa Data .....	64
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	65
4.1. Gambaran Umum PT. Indo Lampung Perkasa .....	65
4.2. Prosedur Pemborongan Pekerjaan Tebang dan/atau Angkut Tebu Pada PT. Indo Lampung Perkasa .....	68
4.2.1. Kualifikasi Pemborong .....	69
4.2.2. Cara Menjadi Pemborong Pekerjaan Tebang dan/atau Angkut Tebu Pada PT. Indo Lampung Perkasa .....	72
4.2.3. Pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Tebang dan/atau Angkut Tebu Pada PT. Indo Lampung Perkasa .....	75
4.2.4. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Tebang dan/atau Angkut Tebu Pada PT. Indo Lampung Perkasa .....	76
4.3. Tanggungjawab Penerima Pekerjaan Apabila Wanprestasi Dalam Pemborongan Pekerjaan Tebang dan/atau Angkut Tebu .....	88
4.4. Upaya-upaya Pencegahan Yang Dilakukan Agar Tidak Terjadi Wanprestasi Dalam Pemborongan Pekerjaan Tebang Dan/atau Angkut Tebu .....	99
4.5. Tanggung Jawab Penerima Pekerjaan Apabila Terjadi Suatu Keadaan Di Luar Kemampuan .....	108
V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	112
5.1. Kesimpulan .....	112
5.2. Saran .....	116
DAFTAR PUSTAKA .....	xv
LAMPIRAN-LAMPIRAN : .....	xvii
1. LAMPIRAN I	
2. LAMPIRAN II	
3. LAMPIRAN III	
4. LAMPIRAN IV	
5. LAMPIRAN V	
6. LAMPIRAN VI	
7. LAMPIRAN VII	
8. LAMPIRAN VIII	
9. LAMPIRAN IX	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai salah satu perusahaan penghasil gula di Propinsi Lampung PT. Indo Lampung Perkasa diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gula penduduk Lampung khususnya dan gula nasional pada umumnya, apalagi ditunjang dengan luas wilayah perkebunan tebu yang cukup, yaitu untuk tahun 2003 areal tanam seluas 20.470, 02 hektar dan areal tebang seluas 18.221, 77 hektar, terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung.

PT. Indo Lampung Perkasa dalam mengurangi keterbatasan kemampuannya dalam hal penebangan dan pengangkutan tebu melakukan kerjasama dengan pihak lain. Bentuk kerjasama antara perusahaan dengan pihak lain dalam hal ini adalah pemborongan pekerjaan penebangan dan pengangkutan tebu, tentunya tidak selamanya akan berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, kadang kala salah satu pihak berbuat wanprestasi yang akhirnya dapat menimbulkan kerugian pada pihak lainnya.

Wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu biasanya tidak dilakukannya, atau



dilakukannya tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dapat pula berarti melakukan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan terhadap janji-janji yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pengangkutan dan penebangan tebu, yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, wanprestasi tersebut dapat berupa terlalu lamanya proses tebang dan angkut tebu, sehingga mengurangi mutu rendemen tebu, proses pengangkutan yang tidak sesuai dengan perjanjian, proses penebangan yang tidak sesuai dengan mutu tebang, dan lain sebagainya.

Keadaan memaksa diluar kekuasaan (*force majeure*), yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu yang akhirnya menghambat pelaksanaan pemborongan pekerjaan bahkan menjadi tidak sesuai dalam perjanjian adalah pada waktu hujan dan mekania. Pada waktu hujan mengakibatkan areal perkebunan dan jalan menjadi becek sehingga proses penebangan dan pengangkutan menjadi terhambat bahkan tidak dapat dilaksanakan. Mekania adalah sebutan teknis (istilah) yang digunakan untuk mengatakan banyaknya tumbuhan yang merambat pada batang-batang tebu sehingga proses penebangan menjadi terhambat, karena susahnya proses penebangan.

Perjanjian pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa dengan pihak pekerja pemborong biasanya dituangkan di dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibuat secara di bawah tangan hal ini tentunya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pihak, dan juga sebagai landasan untuk memudahkan penyelesaian apabila dikemudian hari timbul persoalan, disamping juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu menjadi kesepakatan yang tidak tertulis tapi disepakati dan dipedomani, karena yang menjadi pemborong dalam pekerjaan tebang dan angkut tebu adalah pemborong yang tiap-tiap musim tebang menjadi bagian dari pekerjaan pemborongan tersebut, baik yang sebelumnya memang telah menjadi pemborong pekerjaan atau pengawas (wakil) pemborong dalam mengawasi pekerjaan borongannya, kemudian berkesempatan menjadi pemborong sehingga kemampuan atau kualitas para pemborong secara teoritis oleh pemilik pekerjaan telah diketahui.<sup>1</sup>

Menurut Murphy's Law dalam Munir Fuadi, bahwa *anything that can go wrong will go wrong* maksudnya jika ada kemungkinan salah dari sesuatu persoalan, maka besar kemungkinan hal tersebut akan salah. Jadi jika ada kontrak yang tidak benar atau

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Manager Harvesting, PT. Indo Lampung Perkasa

berat sebelah, maka besar kemungkinan akan menimbulkan sengketa dikemudian hari. Karena itu harus dijaga agar isi kontrak tersebut benar dan adil.<sup>2</sup>

Konsekwensi pada perjanjian pemborongan pekerjaan agar para pihak tidak dirugikan maka dibutuhkan suatu bentuk perjanjian yang baik, yang tidak berat sebelah (memihak) dan dapat dijadikan landasan pemecahan apabila dikemudian hari timbul sengketa diantara pemborong dengan pemilik pekerjaan, tentu sangat riskan dan dapat menimbulkan berbagai interpretasi bermacam-macam jika terjadi sengketa, apabila pelaksanaan perjanjian pemborongan sebagian besar tidak berdasarkan pada batasan-batasan dan ruang lingkup kerja yang dibuat secara tertulis, tetapi hanya pada kebiasaan-kebiasaan sebagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan tahun-tahun yang lampau.

Walaupun demikian, dalam praktik ternyata pula bahwa tidak hanya tanggung jawab hukum secara kontraktual yang muncul kepermukaan dalam bidang pekerjaan pemborongan ini. Sering-sering juga masalah-masalah pekerjaan pemborongan ini menimbulkan keraguan yang mengundang sektor hukum lain. Yang

---

<sup>2</sup> Munir Fuadi, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 2

paling sering terlibat adalah sektor hukum bidang ketenagakerjaan, perbuatan melawan hukum, bahkan hukum pidana.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas maka perlu diadakan suatu penelitian dan pengkajian terhadap perjanjian pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa di Lampung.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab penerima pekerjaan apabila wanprestasi dalam pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu ?
2. Upaya-upaya pencegahan apa yang dilakukan agar tidak terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab penerima pekerjaan apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu ?

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab penerima pekerjaan apabila tidak memenuhi target yang telah ditentukan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan terbang dan/atau angkut tebu
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi wanprestasi dalam pemborongan pekerjaan terbang dan/atau angkut tebu
3. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab penerima pekerjaan apabila terjadi keadaan diluar kemampuan dalam pelaksanaan borongan pekerjaan terbang dan/atau angkut tebu

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

1. Mencari solusi pemecahan dan penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul atau mungkin akan timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan terbang dan angkut tebu khususnya atau perjanjian kerjasama pada umumnya yang telah atau belum diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh perseroan terbatas.

2. Disamping itu diharapkan (secara teoritis) dapat bermanfaat dalam pengembangan hukum perdata khususnya tentang perjanjian pemborongan pekerjaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya**

##### **2.1.1. Pengertian Perjanjian**

Kehidupan manusia yang tidak bisa lepas dari hubungan kausal dengan manusia lain di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tentu tidak selamanya hubungan tersebut berjalan dengan baik satu pihak kadangkala berusaha untuk mengungguli manusia lain atau berbuat curang, sedangkan dipihak lain selalu kalah atau bahkan dikalahkan disinilah peranan hukum yang mengatur dan disepakatai sebagai tata norma dan tata kehidupan manusia memegang peranan untuk memberikan jalan tengah yang diharapkan adil, tidak berat sebelah dan konsisten.

Dalam mengadakan hubungan hukum tiap-tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu dan sebaliknya.

Setiap melakukan hubungan hukum dalam kehidupan modern dewasa ini para pihak biasanya diaktualisasikan dalam

bentuk perjanjian tertulis disamping memudahkan diketahuinya hak dan kewajiban masing-masing juga untuk memudahkan pembuktian apabila dikemudian hari ada pihak yang melakukan wanprestasi.

Menurut Abdulkadir Muhammad perikatan adalah hubungan hukum, hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan dalam lingkup harta kekayaan.<sup>3</sup>

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut belum lengkap, karena menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Menambahkan perkataan "saling mengikatkan diri" dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Sehingga perumusannya menurut beliau

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 199



menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>4</sup>

Menurut Rutten dalam Purwahid Patrik, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata, tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan, adapun kelemahan tersebut dapatlah diperinci, sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Disini dapat diketahui dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidaknya-tidaknya perlu ada rumusan “saling mengikatkan diri”. Jadi jelas nampak konsensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

---

<sup>4</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 49

<sup>5</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 46

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus atau kesepakatan

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :

- a. Mengurus kepentingan orang lain
- b. Perbuatan melawan hukum

Dari kedua hal tersebut di atas merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Sebagaimana disebutkan dalam doktrin lama (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam definisi ini telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban), kemudian menurut doktrin baru (teori baru) yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian diartikan sebagai

suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>6</sup>

Jadi menurut teori baru ini tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Perbuatan itu antara lain :

1. Tahap sebelum perjanjian, yaitu adanya penawaran dan penerimaan
2. Tahap perjanjian, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
3. Tahap pelaksanaan perjanjian

### 2.1.2. Macam-macam Perikatan

Perikatan yang terdapat di dalam masyarakat itu bermacam-macam tergantung kepada kepentingan atau hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan bermacam-macam perikatan pula. Perikatan-perikatan ini dalam hukum perdata dikenal ada beberapa macam yaitu :<sup>7</sup>

1. Perikatan murni

Adalah suatu perikatan di mana masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut

---

<sup>6</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 26

<sup>7</sup> Dikutip dari dan dianalisa berdasarkan Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994, hal. 128-131

itu hanya berupa suatu hal, dan penuntutan itu dapat dilakukan seketika.

## 2. Perikatan bersyarat

Adalah suatu perikatan di mana pihak-pihak di dalam melaksanakan janjinya menggantungkan diri pada suatu kejadian/peristiwa yang masih belum terjadi, sehingga peristiwa itu akan bersifat menangguhkan, membatalkan atau tidak lahirnya perikatan itu.

Suatu perikatan dengan syarat tangguh terjadi apabila lahirnya perikatan ditangguhkan sampai suatu peristiwa yang dimaksud itu terjadi, dan dalam hal perikatan dengan syarat batal, perikatan itu sudah berlangsung, sedang perikatan akan berakhir pada saat kejadian yang dimaksud itu terjadi dan karenanya maka, semua keadaan akan kembali seperti tidak adanya perikatan.

Jika A berjanji akan menyewakan rumahnya di Lampung, jika dia mendapat pekerjaan di Semarang, maka perikatan yang timbul adalah perikatan dengan syarat tangguh, sedangkan apabila dia berjanji bahwa perjanjian sewa menyewa rumah itu akan berakhir jika A pada waktu pindah ke Semarang tidak mendapatkan pekerjaan, maka perikatan semacam ini

adalah perikatan dengan syarat batal. Mengenai perikatan semacam ini ada ketentuan bahwa suatu syarat tertentu tidak sah bila tergantung pada kemauan dari yang berhutang saja, lagi pula apa yang dikehendaki dan apa yang terjadi dimasa yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Di dalam perikatan dengan syarat batal belaku surut sampai saat lahirnya perikatan, sehingga suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi menghentikan perikatan seolah-olah tidak pernah ada perikatan.

### 3. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perbedaan yang terpenting antara perikatan bersyarat dengan perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan itu sudah lahir, hanya pelaksanaan untuk melakukan prestasinya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dan waktu itu pasti terjadi. Sedangkan dalam perikatan bersyarat, kejadian yang akan datang tersebut belum tentu terjadi. Misal : Apabila A menjual sebuah sepeda motor tanggal 1 Juli 2004, dengan syarat penyerahan hak dan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2004, ini merupakan perikatan dengan ketetapan waktu. Dalam hal prestasi tidak boleh ditagih

sebelum waktunya itu tiba, tapi si debitur sudah melaksanakan pembayaran atas kehendak sendiri maka pembayaran itu tidak dapat diminta kembali. Suatu ketetapan waktu itu harus ditafsirkan untuk kepentingan si berhutang, kecuali jika dari sifat perikatan itu sendiri atau dari keadaan ternyata ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan krediturnya.

#### 4. Perikatan alternatif

Adalah suatu perikatan dimana debiturnya boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan objek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain (Pasal 1272 dan Pasal 1273 KUHD).

Misal : A berhutang kepada B sejumlah Rp. 10.000,- tetapi ternyata A tidak dapat mengembalikannya dan ia menjanjikan kepada B untuk menyerahkan barang yaitu berupa jam tangan seharga Rp. 10.000,- dan ada juga barang berupa sebuah mesin tik seharga Rp. 10.000,- ternyata B setuju, asalkan barang tersebut bernilai sejumlah piutangnya. Disini A boleh memilih, apa mau menyerahkan jam tangan atau mesin tik.

Jika salah satu barang yang menjadi objek perikatan itu hilang, atau tidak dapat diserahkan, atau musnah maka perikatan manasuka itu menjadi murni dan bersahaja, jika kedua barang itu hilang dan debitur bersalah tentang hilangnya salah satu atau kedua barang itu maka debitur harus membayar sesuai harga barang tersebut (Pasal 1274 dan Pasal 1275 KUH Perdata). Selain dari perikatan alternatif, adalagi yang disebut perikatan fakultatif, yaitu perikatan dimana debitur wajib memenuhi suatu prestasi atau prestasi lain yang tertentu pula. Misal : A berjanjia kepada B untuk menghibahkan kepadanya sebuah rumah, apabila ia tidak dapat menyerahkan, ia dapat mengganti uang sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian ada juga yang disebut perikatan generic yaitu perikatan yang objeknya ditentukan oleh jenisnya. Misalnya penyerahan kopi jenis Robusta.

#### 5. Perikatan solider (tanggung menanggung)

Di dalam suatu perikatan, pihak-pihak yang mengadakan perikatan itu tidak hanya berdiri atas seorang debitur dengan seorang kreditur saja, tetapi dapat juga dilakukan disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Kemungkinan itu terjadi, apabila debitur terdiri dari beberapa orang maka disebut

perikatan tanggung menanggung yang pasif, dimana tiap-tiap debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitur saja, membebaskan debitur lainnya dari tuntutan kreditur dan perikatannya menjadi hapus ( Pasal 1280 KUH Perdata).

Apabila kreditur terdiri dari beberapa orang ini disebut perikatan tanggung menannggung yang aktif, dimana tiap-tiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhi prestasi tersebut, debitur dibebaskan dibebaskan dari hutangnya dan perikatan menjadi hapus (Pasal 1278 KUH Perdata). Menurut KUH Perdata tidak ada perjanjian dianggap tanggung menanggung kecuali dengan dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian atau dinyatakan oleh Undang-undang.

Misalnya Perikatan tanggung menanggung dimana Undang-undang menetapkan, ini tertera dalam Pasal 1749 KUH Perdata tentang peminjaman barang dan Pasal 1836 KUH Perdata tentang perjanjian jaminan orang (borg tocht), disana ditegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk seluruh bagian debitur lainnya.



Maksud dari perikatan tanggung menanggung adalah untuk memberikan rasa aman bagi kreditur atas pemenuhan perikatannya, dan kreditur mempunyai jaminan yang kuat bahwa piutangnya akan dibayar.

Di dalam hal tanggung jawab, si debitur dapat bertanggung jawab untuk sepenuhnya atau mereka masing-masing bertanggung jawab untuk sebagian dan juga ada kemungkinan mereka bertanggung jawab terhadap seluruh hutang debitur lainnya, hanya ia dapat menagih kembali kepada kreditur lainnya sebesar bagian-bagiannya dan apabila ada debitur yang tidak mampu maka debitur-debitur lainnya harus memikul secara bersama.

6. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi

Menurut Pasal 1296 KUH Perdata, dinyatakan suatu perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi itu adalah sekedar penyerahan suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi baik secara nyata-nyata ataupun secara perhitungan.

Suatu prestasi atau objek perikatan, dapat dibagi atau tidak dapat dibagi dapat dilihat dari sifat barang tersebut atau

maksud daripada perikatannya. Sehingga walaupun sifat barang tersebut dapat dibagi, tetapi penyerahan barang tersebut tidak boleh dilaksanakan sebagian-sebagian. Apabila dalam suatu perikatan hanya ada seorang kreditur, maka perikatan itu harus dianggap tidak dapat dibagi walaupun prestasinya dapat dibagi. Karena menurut Pasal 1390 KUH Perdata, tiada seorang kreditur dapat memaksa krediturnya menerima pembayaran utang sebagian, meskipun utang tersebut dapat dibagi-bagi.

Akibatnya hukum dari dapat atau tidak dapat dibaginya suatu perikatan adalah dalam hal suatu perikatan tidak dapat dibagi maka tiap-tiap kreditur adalah berhak untuk menuntut seluruh prestasinya dari tiap-tiap debitur, sedangkan masing-masing debitur diwajibkan memenuhi prestasi tersebut seluruhnya dengan pengertian bahwa pemenuhan perikatan tidak dapat dituntut lebih dari satu kali.

Jadi suatu perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi hanya akan mempunyai arti jika terdapat lebih dari seorang debitur atau kreditur yang akan berakibat di dalam melakukan prestasi. Perikatan itu hampir serupa dengan perikatan tanggung menanggung, walaupun pada kenyataannya berbeda.

Persamaanya yaitu baik di dalam perikatan tanggung menanggung maupun perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi, kreditur berhak untuk menuntut dari masing-masing debitur pemenuhan seluruh prestasinya, sedangkan perbedaannya pada perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi, yang tidak dapat dibagi karena sifat prestasinya, sedangkan dalam perikatan tanggung menanggung mengenai orang-orangnya yang berhutang atau yang berpiutang.

#### 7. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang menentukan, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan kepada si berpiutang melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhinya.

Maksud diadakan perikatan dengan ancaman hukuman ini adalah mendorong kepada si debitur untuk melaksanakan kewajibannya, dalam waktu yang telah ditentukan. Dan juga untuk mempermudah pembuktian tentang besarnya ganti kerugian bila si debitur tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga apabila A mengadakan perjanjian membuat rumah dengan B dengan diperjanjikan bahwa B harus menyelesaikan-

nya pada tanggal 1 Juli 2004 dan apabila tanggal tersebut tidak selesai, B harus mengganti kerugian sebesar Rp. 100.000,-.

Maka disini ada penetapan berapa besarnya kerugian yang diderita si A. Syarat janji penghukuman adalah merupakan perjanjian *accessoir*, sedangkan perjanjiannya sendiri merupakan perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokoknya tidak sah, maka syarat perjanjian penghukuman menjadi batal, tetapi ini tidak beralaku untuk hal sebaliknya (Pasal 1305 KUH Perdata). Apabila si debitur tidak melaksanakan prestasinya, maka si berpiutang boleh meminta pelaksanaan perjanjian pokok dan boleh menuntut hukuman saja. Ia tidak dapat menuntut bersama-sama dipenuhinya perikatan pokok dan menuntut hukuman, kecuali telah diperjanjikan.

### **2.1.3. Asas-asas Hukum Perjanjian**

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas yaitu : <sup>8</sup>

#### **1. Asas kebebasan berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisa dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat

---

<sup>8</sup> Salim H.S, *Ibid*, hal. 9-13

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Jadi asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Asas kebebasan berkontrak ini juga dibatasi bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 1337 KUH Perdata).

## 2. Asas konsensualisme

Asas ini dapat diketahui dari Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak (lisan).

Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

### 3. Asas pacta sunt servanda

Asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, merka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat diketahui dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

### 4. Asas itikad baik

Asas itikad baik dapat diketahui dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur (dalam perjanjian pemborongan yaitu pihak pemilik pekerjaan dan pemborong pekerjaan) harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik ini terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Itikad baik nisbi (subjektif) biasanya orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek
- b. Itikad baik mutlak merupakan penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadilan (Penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

#### 5. Asas kepribadian (personalitas)

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menyebutkan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan diri sendiri. Lebih lanjut Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, namun

ketentuan ini ada pengecualian sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan.

#### **2.1.4. Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

##### **1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Menurut Sudikno Mertokusumo ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali



- seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
  - e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.<sup>9</sup>

Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

Mengenai kesepakatan ini harus betul-betul murni timbul dari hati sanubari dari pihak yang mengadakan perjanjian, artinya kesepakatan itu tanpa adanya kekhilafan, penipuan atau paksaan dari salah satu pihak maupun dari pihak lain (Pasal 1321 KUH Perdata).

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang.

---

<sup>9</sup> Salim H.S, *Ibid*, hal. 33

Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud Suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian yang merupakan prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan menjadi hak kreditur.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal, tetapi hanya disebutkan sebab yang terlarang (Pasal 1337 KUH Perdata), yaitu apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dari keempat syarat tersebut di atas syarat yang pertama disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan

perjanjian yang disepakati. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

### 2.1.5. Hapusnya Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata, ada sepuluh cara hapusnya perjanjian, yaitu :

- c. Karena pembayaran
- d. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan dan penitipan
- e. Pembaharuan hutang
- f. Perjumpaan hutang
- g. Percampuran hutang
- h. Pembebasan hutang
- i. Musnahnya barang yang berhutang
- j. Kebatalan/Pembatalan
- k. Berlakunya syarat batal
- l. Lewat waktu.<sup>10</sup>

#### 1. Karena pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran disini adalah pembayaran dalam arti yang luas, bukan saja pembayaran berupa uang pembelian, melainkan juga penyerahan barang yang dijual (diperjanjikan) oleh debitur, atau dapat dikatakan juga

---

<sup>10</sup> Uraian di bawah ini berdasarkan dan dianalisa lebih lanjut dari, Subekti, *Op. cit*, hal 152-161, dan Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 218-222

adalah setiap pemenuhan prestasi oleh para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan diantara mereka.

Menurut ketentuan Pasal 1382 KUH Perdata yang berkewajiban membayar tidak hanya debitur melainkan juga orang yang turut berhutang dan menanggung hutang (borg), bahkan juga pihak ketiga, asal saja ia bertindak dan untuk melunasi hutang (melaksanakan prestasi) debitur. Tetapi apabila ia bertindak untuk atas nama sendiri, ia tidak menggantikan kewajiban debitur.

Pembayaran harus dilakukan ditempat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat maka pembayaran mengenai barang yang tertentu harus dilakukan ditempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjian itu dibuat. Dalam hal-hal lainnya, pembayaran harus dilakukan ditempat tinggal kreditur, selama ia terus menerus berdiam dalam wilayah hukum dimana ia berdiam sewaktu perjanjian dibuat dan dalam hal-hal lainnya, dilakukan ditempat tinggal debitur (Pasal 1393 dan Pasal 1477 KUH Perdata).

Apabila pembayaran itu dilakukan secara berkala (angsuran-angsuran) debitur malah dapat keringanan, karena

apabila debitur dapat menunjukkan bukti pembayaran tiga angsuran berturut-turut, terbitlah anggapan bahwa pembayaran angsuran-angsuran sebelumnya sudah lunas, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh kreditur. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak kreditur (Pasal 1394 KUH Perdata).

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan (konsinyasi).

Dalam soal pembayaran akan terjadi konsinyasi apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan Notaris atau juru sita, kemudian kreditur menolak penawaran tersebut. Atas penolakan kreditur ini kemudian debitur menitipkan pembayaran itu kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk disimpan, dengan demikian perikatan menjadi hapus karenanya (Pasal 1404 KUH Perdata).

Akibat hukum dari konsinyasi adalah debitur sudah dianggap melakukan kewajibannya untuk berprestasi, sesudah tanggal itu ia bebas dari pembayaran bunga (Pasal 1404 dan 1407 KUH Perdata).

3. Pembaharuan hutang (novasi)

Yang dimaksud dengan pembaharuan hutang adalah terjadi pembaharuan dengan jalan mengganti hutang lama

dengan hutang baru, debitur lama menjadi debitur baru, kreditur lama menjadi kreditur baru. Dalam hal hutang lama diganti dengan hutang baru, terjadilah penggantian objek perjanjian yang disebut “objektif novasi”, disini hutang lama lenyap. Dalam hal terjadi penggantian subjek (orangnya), apabila krediturnya maka disebut “subjektif aktif novasi” dan jika yang diganti itu debiturnya disebut “subjektif pasif novasi”.

#### 4. Perjumpaan hutang.

Perjumpaan hutang sering juga disebut dengan perhitungan hutang. Dikatakan ada perjumpaan atau perhitungan hutang apabila hutang piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan. Dengan adanya perhitungan ini hutang piutang lama menjadi lenyap.

Misalnya A mempunyai hutang kepada B sejumlah Rp. 200,- dan sebaliknya B mempunyai hutang kepada A sejumlah Rp. 225,- setelah diperhitungkan ternyata B masih mempunyai hutang kepada A sebesar Rp. 25,-. Jadi disini hutang piutang lama menjadi lenyap, yang ada hanyalah selisihnya yaitu hutang B kepada A sebesar Rp. 25,- tetapi

kalau jumlah hutang masing-masing pihak itu sama, maka karena perhitungan itu lenyap sama sekali.

Supaya hutang itu dapat diperjumpakan perlu dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1427 KUH Perdata, yaitu :

- a. Berupa sejumlah uang atau barang yang dapat dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama.
- b. Hutang itu seketika dan dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya.
- c. Hutang itu harus sudah dapat ditagih.

Tiap-tiap hutang apapun juga sebabnya dapat diperjumpakan kecuali dalam tiga hal (Pasal 1429 KUH Perdata), yaitu :

- a. Apabila dituntutnya penegembalian suatu barang yang secara melawan hukum dirampas dari pemiliknya.  
Misalnya pencurian.
- b. Apabila dituntutnya penegembalian suatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan.
- c. Terhadap suatu hutang yang bersumber kepada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita.

Selain ketentuan Undang-undang tersebut, yurisprudensi juga menetapkan perjumpaan hutang berikut ini tidak dapat dimungkinkan yaitu :

- a. Hutang-hutang negara yang berupa pajak
- b. Hutang-hutang yang timbul dari perhitungan wajar.

#### 5. Percampuran hutang

Menurut ketentuan Pasal 1436 KUH Perdata, percampuran hutang terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu artinya berada dalam tangan satu orang. Percampuran tersebut terjadi demi hukum, atau secara otomatis. Dalam percampuran hutang ini, hutang piutang menjadi lenyap.

Misalnya A sebagai ahli waris mempunyai hutang kepada B sebagai pewaris, kemudian B meninggal dunia dan ahli waris A menerima warisan termasuk juga hutang atas dirinya sendiri, dengan demikian hutang itu lenyap demi hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 1437 KUH Perdata ditentukan bahwa percampuran hutang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung hutangnya (borg). Sebaliknya percampuran yang terjadi pada seorang



penanggung hutang tidak sekali-kali menghapuskan hutang pokok. Jadi apabila penanggung menjadi ahli waris, percampuran hutang tidak terjadi dan hutang tetap dan hanya saja penanggung berubah menjadi kreditur.

Misalnya A mempunyai kawan debitur C yang sama-sama saling menanggung hutang B, kemudian A menjadi ahli waris B maka percampuran hutang hanya berlaku bagi bagian A dalam hutang itu. Dengan demikian A berubah menjadi Kreditur C untuk jumlah hutangnya kepada B setelah dikurangi dengan bagiannya sebagai debitur dulu.

#### 6. Pembebasan hutang

Pembebasan hutang dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian. Dengan adanya pembebasan ini perikatan menjadi hapus. Menurut Pasal 1438 KUH Perdata, pembebasan tidak boleh berdasarkan persangkaan melainkan harus dibuktikan. Bukti tersebut dapat dipergunakan misalnya dengan pengembalian surat piutang asli oleh kreditur secara sekarela (Pasal 1439 KUH Perdata).

Kalau ada beberapa debitur yang saling menanggung maka pembebasan seorang debitur membebaskan pula kawan-kawan debitur lainnya. Pembebasan debitur utama membebaskan pula penanggung-penanggung lainnya. Tetapi pembebasan penanggung tidak membebaskan debitur utama (Pasal 1441 dan Pasal 1442 KUH Perdata). Pasal 1441 KUH Perdata menyatakan pengembalian barang yang diberikan dalam gadai tidak cukup dijadikan persangkaan tentang pembebasan hutang. Hal ini memang sudah sedemikian adanya, karena perjanjian gadai adalah perjanjian *accessoir*, yang bersifat pelengkap saja dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang. Pengembalian benda jaminan tidak berarti membebaskan hutang piutang.

7. Musnahnya barang yang berhutang.

Menurut ketentuan Pasal 1444 KUH Perdata, apabila barang tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang diluar kesalahan debitur sebelum ia lalai menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, maka perikatannya menjadi lenyap atau hapus. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa debitur perlu membuktikan bahwa musnahnya atau hilangnya benda itu diluar

kesalahannya. Dalam pengertian diluar kesalahannya ini tersimpul usaha-usaha yang telah dilakukan oleh debitur untuk mencegah hilang atau musnahnya benda yang menjadi objek perikatan itu.

Tetapi bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya karena pencurian, maka musnah atau hilangnya barang itu tidak membebaskan debitur (orang yang mencuri) itu untuk mengganti harganya.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1444 KUH Perdata, bahwa meskipun debitur lalai menyerahkan barang itu, iapun akan bebas dari perikatan itu, apabila ia dapat membuktikan bahwa hapus atau hilangnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar kekuasaannya dan barang tersebut juga akan menemui nasib yang sama meskipun sudah berada ditangan orang kreditur.

Apabila debitur karena kehilangan itu telah memperoleh ganti kerugian dari orang lain maka hak atas ganti kerugian itu harus diserahkan kepada kreditur (Pasal 1445 KUH Perdata). Hal ini adalah sudah semestinya karena barang yang terutang itu pada dasarnya telah menjadi hak dari kreditur.

## 8. Kebatalan/Pembatalan

Kalau menilik dari ketentuan Pasal 1446 KUH Perdata, ternyata yang dimaksudkan disini hanyalah mengenai soal pembatalan saja tidak mengenai kebatalan. Karena syarat-syarat untuk pembatalan itu adalah syarat-syarat subjektif yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Sebenarnya yang dimaksud disini adalah suatu perjanjian yang batal demi hukum atau suatu perjanjian yang dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak karena tidak terpenuhinya syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, menuntut pembatalan kepada hakim. Dan dengan cara pembelaan yaitu menunggu sampai digugat dimuka hakim untuk memenuhi perjanjian dan disitu baru menunjukkan alasan tentang kekurangannya perjanjian itu. Untuk pembatalan aktif, Undang-undang memberikan batas waktu yaitu lima tahun. Sedangkan untuk pembatalan sebagai pembelaan tidak diadakan pembatasan waktu.

#### 9. Beralakunya syarat batal.

Berlaku syarat batal disini adalah apabila syarat batal yang ditetapkan dalam perjanjian dipenuhi. Dengan dipenuhinya syarat batal itu maka perikatan menjadi lenyap. Syarat batal ini dapat dilihat dalam perikatan bersyarat. Syarat batal itu asasnya selalu berlaku surut, yaitu sejak perjanjian itu dilahirkan.

#### 10. Lewat waktu

Lewat waktu dapat ditemui dalam Pasal 1946 KUH Perdata yang disebut juga daluarsa. Dengan lewatnya waktu tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang maka perikatannya hapus. Menurut ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata, segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluarsa itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk.

Ada beberapa hal yang dapat mengakhiri hubungan antara pemilik pekerjaan dengan pemborong, atau lazim disebut hapusnya perjanjian pemborongan. Hal-hal tersebut adalah :

1. Perjanjian pemborongan hapus dengan selesainya pekerjaan 100% sesuai dengan kontrak. Kemudian hasil pemborongan tersebut diserahkan.
2. Perjanjian pemborongan hapus karena pekerjaan pemborongan dihentikan secara sepihak oleh si pemilik pekerjaan.
3. Perjanjian pemborongan hapus karena adanya pemutusan perjanjian yang disebabkan karena wanprestasi.

Lazimnya dengan selesainya pekerjaan secara keseluruhan kemudian diserahkan kepada pemilik pekerjaan maka berakhirilah perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam pekerjaan pemborongan tebang dan angkut tebu walaupun pekerjaan telah diserahkan perjanjian tidaklah berakhir karena pekerjaan pemborongan tebang dan angkut tebu adalah jenis pekerjaan dengan penyelesaian dan penyerahan setahap demi setahap waktu demi waktu, hari demi hari setiap selesai langsung diserahkan, sedangkan perjanjian berakhir setelah musim tebang selesai.

Di dalam perjanjian pemborongan tebang dan angkut tebu dikenal juga pemutusan hubungan hukum antara pemilik pekerjaan dengan pemborong secara temporer (tidak tetap) berlangsung antara tiga sampai tujuh hari, ini biasanya akibat wanprestasi dari pihak pemborong pekerjaan.

Berakhirnya perjanjian karena wanprestasi biasanya pihak pemborong masih mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungannya. Dan untuk menjamin terlaksananya pekerjaan tersebut maka biasanya pemorong diwajibkan membayar jaminan penyelesaian pekerjaan.

## **2.2. Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan**

Perjanjian pemborongan pekerjaan menurut Pasal 1601 b, yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Dari definisi yang diberikan oleh KUH Perdata tersebut terlihat bahwa undang-undang secara keliru memandang kepada perjanjian pemborongan sebagai jenis kontrak unilateral, dimana seolah-olah hanya pihak pemborong yang mengikatkan diri dan harus berprestasi. Padahal dalam perkembangan saat ini baik pihak pemborong maupun pihak pemilik pekerjaan saling mengikatkan diri, dengan masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Kewajiban utama dari pihak pemborong adalah

melaksanakan pekerjaan sementara kewajiban utama dari pihak pemilik pekerjaan adalah membayar uang borongan.

Pemborongan pekerjaan merupakan persetujuan antara dua belah pihak yang menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya, atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan. Disini tidaklah penting bagi pihak yang memborongkan pekerjaan bagaimana pihak yang memborong pekerjaan mengerjakannya, karena yang dikehendaki adalah hasil dari pekerjaan tersebut, yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik (mutu dan kualitas/kwantitas) dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

#### **2.2.1. Unsur-unsur Perjanjian Pemborongan Pekerjaan**

Di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat beberapa unsur yaitu :

1. Merupakan suatu perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian persetujuan yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sehubungan dengan itu dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara



sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap orang bebas untuk membuat suatu perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Hal ini merupakan ketentuan yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian pemborongan pekerjaan.

Pasal-pasal yang dibuat dalam perjanjian oleh para pihak pada dasarnya hanya bersifat mengatur dan melengkapi saja, artinya jika suatu perjanjian tidak mengatur suatu hal berarti terhadap hal-hal yang tidak diatur tersebut tunduk pada ketentuan undang-undang yang ada. Sering terjadi bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian dengan tidak mengatur segala sesuatunya secara terperinci, melainkan hanya mengatur hal-hal yang pokok saja.

## 2. Menyelenggarakan Suatu Pekerjaan

Hal utama yang harus dilakukan oleh pemborong dalam perjanjian pemborongan pekerjaan adalah melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan hasilnya kepada pihak yang

memborongkan. Dalam hal ini pihak yang memborongkan berkewajiban membayar harga yang telah ditentukan.

Kemudian dalam perjanjian ini adalah pemborong harus menimbulkan suatu yang baru seperti yang dikemukakan oleh R. Soekardono, yaitu :

Sifat mutlak dari perjanjian ini ialah bahwa pemborong dengan melakukan pekerjaan harus mencapai hasil-hasil tertentu yang belum ada dan yang pembuatannya telah direncanakan sebelumnya, singkatnya harus dihasilkan benda baru tertentu oleh pihak pemborong.<sup>11</sup>

Hal inilah yang membedakan perjanjian pemborongan pekerjaan dengan perjanjian kerja yang lain.

### 3. Untuk Kepentingan Pihak Lain

Dalam hal ini jelas bahwa hasil dari pekerjaan bukan untuk dinikmati sendiri, akan tetapi pekerjaan tersebut harus diserahkan kepada pihak lain yaitu pihak yang memborongkan, dengan menerima pembayaran sejumlah uang sebagai harga dari hasil pekerjaan.

Namun tidak berarti pemborong tersebut tidak mempunyai kepentingan sama sekali terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Pemborong mempunyai hak retensi terhadap pekerjaan yang telah diselesaikannya, apabila pemberi kerja tidak membayar harga yang ditentukan.

---

<sup>11</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Dian Rakyat, 1983, hlm 77

#### 4. Menerima Harga Yang Ditentukan

Di dalam menentukan harga dari pekerjaan pemborongan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Harga borongan ditentukan secara keseluruhan, artinya bahwa perhitungan harga dihitung mulai dari persiapan pelaksanaan pekerjaan hingga pekerjaan tersebut selesai dan diserahkan kepada prinsipal. Pembayaran dilakukan secara langsung terhadap harga yang telah ditentukan.
- b. Harga pemborongan ditentukan secara bagian perbagian artinya bahwa perhitungan harga borongan tersebut dilakukan dengan membagi seluruh pekerjaan menjadi beberapa bagian. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan tersebut selesai dalam berapa persen sesuai perjanjian. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1608 KUH Perdata yaitu :

Jika suatu pekerjaan dikerjakan sepotong demi sepotong atau seukuran demi seukuran maka pekerjaan itu dapat diperiksa sebagian, pemeriksaan tersebut dianggap terjadi untuk semua bagian yang telah dibayar, apabila pihak yang memborongkan tiap-tiap kali membayar si pemborong menurut imbalan dari apa yang telah selesai dikerjakan.

### 2.2.2. Bentuk Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Perjanjian pemborongan pekerjaan menurut Sri Soedewi Masjchum Sofwan, pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis, karena selain berguna bagi kepentingan pembuktian juga perjanjian pemborongan pekerjaan tergolong perjanjian yang mengandung resiko bahaya yang menyangkut keselamatan umum dan resiko hasil perusahaan. Sehingga perjanjian pemborongan pekerjaan juga dibuat dalam bentuk standar, yaitu berdasarkan pada berlakunya peraturan standar yang menyangkut segi yuridis dan segi teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak.<sup>12</sup>

Untuk pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa dalam hal pembuatan perjanjian kontraknya secara umum tunduk pada ketentuan dalam KUH Perdata namun secara rinci dibuat secara standar oleh perusahaan pemilik pekerjaan, karena bertujuan untuk melindungi bahan utama produknya.

### 2.2.3. Jenis Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Menurut cara terjadinya perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibedakan ke dalam :

---

<sup>12</sup> Sri Soedewi Masjchum Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 54.

- a. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diperoleh sebagai hasil pelelangan atas dasar penawaran yang diajukan
- b. Perjanjian pemborongan pekerjaan atas dasar penunjukan
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diperoleh sebagai hasil perundingan antara pemberi tugas dengan pemborong.<sup>13</sup>

Pada prinsipnya pemborongan pekerjaan sektor swasta dikenal dua prosedur pemilihan pemborong, yaitu :

- a. Pemilihan kontraktor secara negosiasi

Melalui sistem negosiasi, pemilihan kontraktor tidak dilakukan dengan suatu tender tertentu, akan tetapi pihak pemilik pekerjaan bernegosiasi langsung dengan pihak pemborong untuk memastikan apakah kontraktor tersebut dapat dipilih untuk mengerjakan proyek yang bersangkutan. Sehingga prosedur negosiasi ini praktis lebih bersifat informal.

Dalam hal ini pihak pemilik pekerjaan mengontak satu atau lebih pemborong yang menurut penilaiannya mampu mengerjakan pekerjaan dimaksud, sambil menginformasikan persyaratan-persyaratan untuk itu. Biasanya pihak pemilik pekerjaan memintakan pihak pemborong untuk memasukkan juga penawaran kepada pihak pemilik pekerjaan.

Sungguhpun tidak bersifat formal, prosedur negosiasi dalam memilih pihak kontraktor seringkali memerlukan dasar-

---

<sup>13</sup> Ibdi, hlm. 59

dasar tertentu yang merupakan *framework* tertentu untuk memperlancar negosiasi dimaksud.

Pihak pemilik pekerjaan juga seringkali menyediakan dokumen tertentu yang berisikan ruang lingkup pekerjaan dan beberapa hal teknis pokok dari pekerjaan tersebut dimana nantinya negosiasi pada prinsipnya berpatokan pada dokumen tersebut.

Di dalam pemborongan pekerjaan tebang tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa lebih dilakukan dengan pemilihan kontraktor secara negosiasi karena lebih mengedepankan faktor sudah kenal dengan baik, sehingga sudah tidak disangsikan lagi kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan yang sudah rutin dilakukan setiap musim tebang tebu, sehingga lebih menjamin faktor terlaksananya pekerjaan pemborongan dengan baik.

b. Pemilihan kontraktor secara tender

Ada dua macam tender yang lazim dilakukan dalam praktek, yaitu pertama sistem tender terbuka pada sistem ini tender mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam tender tersebut, dalam hal ini dapat diundang dengan cara pemasangan iklan di media massa.

Kemudian tender terbatas yaitu hanya beberapa pihak tertentu saja untuk berpartisipasi dalam tender tersebut. Tentu saja sungguhpun sistem tender terbuka terkesan lebih formal dengan dokumentasi yang lebih rumit, akan tetapi sistem ini mengandung manfaat yang lebih nyata, antara lain dengan semakin banyaknya pihak yang berpartisipasi dalam tender tersebut, tentu akan dikemukakan semakin banyak pilihan, yang pada akhirnya akan menemukan pemborong yang terbaik

Sedangkan menurut cara penentuan harganya perjanjian pelaksanaan pemborongan dapat dibedakan atas tiga bentuk yaitu :

- a. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga pasti (*fixed price*), disini harga pemborongan telah ditetapkan secara pasti, baik harga kontrak maupun harga satuan.
- b. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga lumpsum, disini harga pemborongan diperhitungkan secara keseluruhan.
- c. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar harga satuan (*unit price*) yaitu harga yang diperhitungkan untuk setiap unit.
- d. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar jumlah biaya dan upah (*cost plus fee*), disini pemberi tugas akan membayar pemborongan dengan jumlah biaya yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan ditambah dengan upahnya.<sup>14</sup>

Pada dasarnya pemborongan pekerjaan terjadi atas dasar penetapan harga yang sudah pasti. Hal demikian sesuai dengan ketentuan dari perjanjian untuk melakukan pekerjaan pada umumnya, yang menetapkan harga tertentu untuk menghasilkan pekerjaan tertentu.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 60

#### 2.2.4. Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Menurut Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, isi perjanjian pemborongan pekerjaan pada umumnya memuat secara terperinci mengenai :

- a. Luas pekerjaan yang harus dilaksanakan dan memuat uraian tentang pekerjaan dan syarat-syarat pekerjaan
- b. Penentuan tentang harga pemborongan
- c. Mengenai jangka waktu penyelesaian pekerjaan
- d. Mengenai sanksi dalam hal terjadi wanprestasi
- e. Tentang resiko dalam hal terjadinya overmatch.
- f. Penyelesaian jika terjadi perselisihan.
- g. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan.

<sup>15</sup>

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa, perjanjian tidak terikat dengan ketentuan peraturan yang ada tetapi dikembalikan kepada asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUH Perdata, karenanya para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Secara umum perjanjian pemborongan telah sama-sama diketahui oleh masing-masing pihak baik oleh pemilik pekerjaan maupun penerima pekerjaan, karena pemborongan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang hampir selalu dilakukan oleh para pemborong pada setiap musim tebang. Adapun perjanjianannya antara lain yaitu :

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 62



- a. Mengenai lingkup pokok pekerjaan
- b. Standar mutu pekerjaan
- c. Hak dan kewajiban para pihak
- d. Penyelesaian perselisihan
- e. Resiko dalam hal terjadi *overmacht/force majeure*.
- f. Waktu pelaksanaan.
- g. Sanksi-sanksi
- h. Tentang jaminan pekerjaan

### 2.3. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya

Wanprestasi merupakan lalai, alpa, atau ingkarnya seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan sempurna sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Menurut Subekti dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi baik karena lalai ataupun karena kesengajaan, yaitu apabila :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>16</sup>

Dalam perjanjian tidaklah mudah untuk menyatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi atau lalai, karena seringkali juga

---

<sup>16</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hal 45

tidak diperjanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang telah diperjanjikan.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan, jangka waktunya tetapi siberhutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi harus lebih dahulu ditagih. Debitur harus diingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian.

Sebelum dinyatakan wanprestasi atau lalai, seseorang debitur harus lebih dahulu ditagih atau diberi teguran/somasi, sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyebutkan “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga bentuk teguran/peringatan, yaitu :

a. Surat perintah

Surat perintah atau surat peringatan resmi dari hakim atau juru sita pengadilan biasanya berbentuk penetapan

(beschiking). Berdasarkan surat perintah tersebut juru sita memberi teguran secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus berprestasi.

b. Akta sejenis

Akta sejenis ini merupakan peringatan secara tertulis, maksudnya dapat berupa akta di bawah tangan atau akta otentik.

c. Tersimpul dalam perjanjiannya sendiri

Maksudnya sejak membuat perjanjian tersebut kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam hal-hal tertentu bahwa teguran tidak diperlukan, yaitu jika :

1. Debitur tidak memberikan prestasi sama sekali
2. Apabila kreditur tidak meminta pemenuhan prestasi
3. Apabila debitur mengaku dalam keadaan lalai

Akibat yang timbul dengan adanya wanprestasi adalah :

1. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi baik disertai ganti rugi ataupun tidak.
2. Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

3. Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian disertai dengan permintaan penggantian kerugian.
4. Pihak kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaannya itu terlambat.

Salah satu sanksi yang dapat diterapkan kepada debitur yang melakukan wanprestasi adalah penggantian kerugian. Wujud kerugian yang harus diganti oleh debitur dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga.

Untuk mencegah agar kredtur tidak menuntut ganti rugi kepada debitur terlalu tinggi maka Undang-undang memberikan batasan mengenai hal-hal yang dapat dimintakan ganti rugi. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1247, 1248 dan 1250 KUH Perdata tentang pembatasan ganti rugi.

Pasal 1247 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”.

Dalam Pasal 1248 KUH Perdata disebutkan bahwa “Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya si berhutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai

kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan”.

Dari kedua ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa ganti kerugian itu dibatasi hanya meliputi kerugian yang nyata dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

Dalam pemborongan pekerjaan dimungkinkan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian. Dalam hal demikian yang mungkin terjadi adalah pemutusan perjanjian disertai dengan pengganti kerugian. Yang dimaksud pemutusan perjanjian dapat berarti pekerjaan yang telah diselesaikan/dikerjakan akan tetap dibayar dan pekerjaan yang belum dikerjakan itu yang diputuskan, atau pekerjaan yang telah selesai dianggap tidak pernah dilakukan karena merupakan satu kesatuan dengan pekerjaan lain sehingga tidak perlu dilakukan pembayaran, biasanya disesuaikan dengan perjanjian awal. Akibat dari pemutusan perjanjian pemborongan selain pemborong diwajibkan membayar benda-benda yang telah diperjanjikan, juga wajib membayar kerugian berupa ongkos-ongkos (biaya), kerugian dan bunga yang harus dibayar.

#### 2.4. Force Majeure

Dapat dikatakan force majeure apabila keadaan itu terjadi diluar kekuasaan debitur dan keadaan tersebut juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat.<sup>17</sup>

Keadaan diluar kemampuan ada yang bersifat absolut (mutlak) yaitu dalam hal sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya, dan ada yang bersifat relatif (tidak mutlak) yaitu berupa suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat dilaksanakan.<sup>18</sup>

Dalam peristiwa keadaan diluar kemampuan yang bersifat relatif debitur bukannya tidak mungkin memenuhi prestasi, tetapi masih mungkin. Keadaan memaksa yang seperti ini biasanya hanya bersifat sementara. Perikatan tidak berhenti (tidak batal) hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan sudah tidak ada lagi maka pemenuhan prestasi dilanjutkan, keadaan inilah yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan terbang dan angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa.

Dalam KUH Perdata keadaan memaksa ini diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Dua pasal tersebut terletak

---

<sup>17</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 122

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. cit*, hal. 205-206

dalam bagian yang mengatur mengenai ganti rugi. Sebab pembentuk Undang-undang memandang bahwa keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>19</sup>

Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Dalam Pasal 1245 KUH Perdata disebutkan bahwa “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantikannya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa debitur dapat dibebaskan dari kewajibannya membayar biaya, rugi dan bunga apabila tidak terlaksananya atau terlambatnya perjanjian disebabkan oleh keadaan memaksa.

---

<sup>19</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 55

## **2.5. Pekerjaan Penebangan dan Pengangkutan Tebu**

Pekerjaan tebang tebu merupakan proses menebang tebu dari posisi satu kesatuan dengan akar dan pucuk tebu hingga terpisah, dengan cara dan teknik tertentu sesuai dengan standar mutu yang ditentukan dalam perjanjian tebang tebu.

Sedangkan pengangkutan tebu merupakan proses diangkutnya hasil tebang tebu dengan kendaraan tertentu dan cara tertentu hingga sampai ditempat yang ditentukan (biasanya) pabrik pengolahan tebu.

## **2.6. Jenis Pemborong Pekerjaan Pada PT. Indo Lampung Perkasa**

Pemborong pekerjaan tebang dan angkut tebu (kontraktor) dalam PT. Indo Lampung Perkasa terbagi menjadi tiga, yaitu :

### **a. Kontraktor Loose Cane**

Kontraktor Loose Cane adalah pemborong pekerjaan pada perusahaan yang hanya mengerjakan tebang tebu saja, pekerjaan penebangan tebu termasuk pula mengumpulkan dan pengikatan tebu.

### **b. Kontraktor Loose Box**



Kontraktor Loose Box adalah pemborong pekerjaan pada perusahaan yang hanya mengerjakan pengangkutan tebu saja.

c. Kontraktor Bundle Cane

Kontraktor Bundle Cane adalah pemborong pekerjaan pada perusahaan yang mengerjakan tebang sekaligus angkut tebu.

### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>20</sup>

Pada penelitian ini dilakukan jenis penelitian yang meneliti keberlakuan dan sikap manusia terhadap aturan hukum yang berlaku, sikap bagaimana jika hukum tidak cukup mengatur dan melindungi kepentingan manusia, serta bagaimana upaya manusia untuk melindungi kepentingannya itu.

#### **3.1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, maka dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah dengan meninjau ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

perjanjian-perjanjian pada umumnya dan perjanjian pemborongan pada khususnya yang diaktualisasikan dalam praktek oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemborong pekerjaan dibidang tebang dan angkut tebu, kemudian dilihat pula bagaimana praktek pelaksanaan perjanjian pemborongan itu.

### **3.2. Teknik Pengumpulan Data**

Data diperoleh berdasarkan metode pengumpulan data primer dan data sekunder :

#### **3.2.1. Metode pengumpulan data primer, yaitu :**

Cara memperoleh data langsung didapatkan dari lapangan penelitian dalam hal ini diperoleh melalui wawancara dan pengamatan di lapangan.

Wawancara dilakukan secara langsung yaitu dengan tanya jawab dengan pihak yang berkompeten dalam PT. Indo Lampung Perkasa, dan pihak kontraktor atau pemborong pekerjaan tebang tebu berdasarkan pertanyaan yang telah penulis siapkan terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar dapat memperoleh keterangan yang selengkap-lengkapny mengenai materi penulisan, sekaligus untuk dapat mengetahui

kemungkinan dipakainya bermacam-macam istilah hukum atau klausula-klausula dalam perjanjian pemborongan baik yang ditentukan undang-undang maupun yang digunakan dalam praktik.

### **3.2.2. Metode pengumpulan data sekunder, yaitu :**

Dengan melakukan studi kepustakaan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder terdiri dari :

#### **3.2.2.1. Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan**

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- d. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian

#### **3.2.2.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum**

yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan

dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hokum primer, yaitu terdiri dari :

- a. Buku-buku hasil karya para ahli
- b. Makalah
- c. Majalah

3.2.2.3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hokum primer dan sekunder, seperti:

- a. Kamus hukum
- b. Kamus lainnya yang menyangkut penelitian

### **3.3. Populasi, Teknik Sampling dan Responden**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin diteliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.<sup>21</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah para pemborong pekerjaan yaitu orang-orang yang bergerak sebagai pemborong

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemtiro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 44

pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa.

Adapun pengambilan sampel menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Dan pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat dan secara mutlak menentukan berapa persen sampel yang harus diambil dari populasi.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut maka sampel ditentukan secara purposive sample (sampel bertujuan) dimana tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Yang akhirnya ditetapkan bahwa sampel untuk pemborong tebang dan/atau angkut tebu pada PT.Indo Lampung Perkasa, adalah :

1. Dua pemborong tebang (losse cane), yaitu :
  - a. Muchtar
  - b. Suwono
2. Dua pemborong tebang dan angkut (bundle cane), yaitu :
  - a. Suryanto
  - b. Triono
3. Satu pemborong angkut (losse box), yaitu :

-Edy

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hal. 46

Sedangkan untuk pihak di dalam PT. Indo Lampung Perkasa sendiri, yang akan menjadi responden adalah pihak yang secara langsung menangani pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu, yaitu :

1. Manajer Harvesting
2. Manajer Umum

### **3.4. Analisa Data**

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan menurut pokok permasalahan, kemudian disistimatisasikan guna mempermudah melakukan analisis dan interpretasi data. Semua data yang telah terkumpul yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder serta semua informasi yang didapat akan dianalisa secara kualitatif, yakni analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci berdasarkan interpretasi data yang ada dengan memperhatikan konsep dan tiori dalam bentuk uraian-uraian yang diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang diteliti dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum PT. Indo Lampung Perkasa**

Berdasarkan hasil penelitian International Contact Bussines System, Inc (ICBS, Inc), produksi gula nasional selama 20 tahun terakhir ini, memberikan gambaran bahwa meningkatnya produksi gula secara nasional disebabkan oleh perluasan areal. Sedangkan produktivitas tanaman tebu yang ditunjukkan dengan basil hablur per hektar dan rendemen nampak cenderung menurun.<sup>23</sup>

Dalam upaya memenuhi kebutuhan gula domestik yang terus meningkat sangat pesat sekitar 3,8 juta ton gula per tahun, seiring dengan laju peningkatan penduduk dan pendapatan masyarakat, pemerintah bersama-sama para pelaku usaha telah berusaha keras memacu pertumbuhan industri gula. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah produksi gula dalam negeri yang belum mencukupi kebutuhan konsumsi yang terus mengalami peningkatan, dibarengi tekad mengembalikan citra Indonesia, yang pernah berhasil menjadi produsen gula pada jaman Hindia Belanda.

---

<sup>23</sup> PT. Indo Lampung Perkasa, *Latar Belakang dan Sejarah berdirinya PT. Indo Lampung Perkasa*, Juni 1999, tanpa halaman



Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan dengan memberikan kesempatan serta kemudahan bagi pihak swasta (PMDN maupun PMA) untuk mendirikan industri gula di luar Pulau Jawa yang lahannya masih sangat memungkinkan. Kebijakan pemerintah yang dimaksud antara lain :

1. Perbaikan sistem pemasaran gula dimana pabrik gula diberikan keleluasaan untuk memasarkan sendiri sebesar 75 % dari produksi untuk Indonesia Bagian Timur dan 50 % dari produksi untuk Indonesia Bagian Barat.
2. Memberikan Hak Guna Usaha (HGU) selama 30 – 35 tahun dan dapat diperbaharui.
3. Membantu membuat sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan pelabuhan.
4. Memberikan kemudahan perizinan baik ditingkat pusat maupun daerah.<sup>24</sup>

Kebijakan ini cukup mendapat perhatian kalangan pelaku usaha di negeri ini, diantaranya mereka telah menanamkan modal dengan membangun industri gula di Propinsi Lampung.

Perusahaan industri gula di Lampung yang seluruhnya berskala nasional tersebut, masing-masing tersebar di beberapa kabupaten. Di Lampung Tengah terdapat : PT. Gunung Madu

---

<sup>24</sup> PT. Indo Lampung Perkasa, , *Ibid*, Juni 1999.

Plantations (GMP), dan PT. Gula Putih Mataram (GPM), di Tulang Bawang terdapat : PT. Sweet Indo Lampung (SIL) dan PT. Indo Lampung Perkasa (ILP), sedangkan di Lampung Utara terdapat : PG Bunga Mayang (BUMN) dan yang masih dalam taraf persiapan pembangunan pabriknya yaitu PT. Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI).

Dalam kancah industri gula nasional, PT. Garuda Panca Arta (GPA) dengan bendera Sugar Group Companies (SGC). Dimana perusahaan gula yang tergabung dalam Sugar Group Companies (SGC) antara lain : PT. Gula Putih Mataram (GPM), PT. Sweet Indo Lampung (SIL) dan PT. Indo Lampung Perkasa (ILP), ditambah perusahaan industri pengolahan ethanol yaitu PT. Indo Lampung Distillery, hadir di Propinsi Lampung.<sup>25</sup>

PT. Indo Lampung Perkasa sebagai salah satu perusahaan penghasil gula di bawah bendera Sugar Group Companies (SGC) milik PT. Garuda Panca Arta (GPA), didirikan berdasarkan akta Notaris Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Nomor : 1739, dengan status perusahaan adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Info Sugar Group Companies, *Spectacular Project Menuju 10 Ton Gula Per-Hektar*, Nomor 01 Edisi Oktober – Desember 2003

<sup>26</sup> PT. Indo Lampung Perkasa, *Ibid*, Juni 1999.

Luas tanaman dan produksi PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) tahun 2003, adalah areal tanam 20.470, 04 hektar, areal tebang 18.221,77 hektar, produksi tebu 1.150.331, 34 ton, produksi gula 99.736, 15 ton.<sup>27</sup>

#### **4.2. Prosedur Pemborongan Pekerjaan Tebang dan/atau Angkut Tebu Pada PT. Indo Lampung Perkasa.**

Ditengah gencarnya kampanye pencanangan proyek “Target 10 Ton” gula perhektar, pada musim panen tahun 2004, dalam pelaksanaannya telah menerapkan program terpadu untuk menekan kerugian yang mungkin timbul diakibatkan belum dilakukannya kegiatan panen secara baik dan efisien. Salah satunya adalah program “bakar-ke-giling tebu”.

Sebagai pengawasan dalam pelaksanaan “bakar-ke-giling tebu” (*Burn to Crush*), Harvesting Manager adalah pihak yang bertanggung jawab mengawasi dan menilai kinerja para kontraktor dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan penebangan dan pengangkutan tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Gambaran Umum (*Company Profile*), PT. Indo Lampung Perkasa, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, tanpa halaman

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Manager Harvesting, PT. Indo Lampung Perkasa.

Pengawasan dan penilaian dimulai dari sebelum pemborongan itu dimulai, pada saat pelaksanaan pemborongan, hingga selesainya pemborongan tersebut.

#### **4.2.1. Kwalifikasi Pemborong**

Untuk menjadi pemborong pekerjaan tebang dan angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa, tidaklah seperti menjadi pemborong pada pekerjaan-pekerjaan lainnya, ia harus mempunyai kwalifikasi tertentu yang sangat ketat aturannya dalam perusahaan.

Biasanya pemborong pekerjaan tebang dan angkut tebu adalah pemborong yang sudah biasa (pernah) dan mendapat kepercayaan untuk menjadi pemborong tebang dan angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa atau perusahaan gula lainnya. Hal ini menyangkut jenis pekerjaannya yang tidak dapat diukur kwalitas pekerjaannya-hanya pada saat pekerjaan itu selesai. Sebagai contoh pada kwalitas tebu dalam kemampuan menghasilkan gula (rendemen) walaupun pihak pemborong telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, hasil dan akibat pekerjaan bukan ditentukan pada saat pekerjaan itu telah diterima oleh perusahaan (pemilik pekerjaan) tetapi pada saat diolahnya tebu oleh perusahaan hingga menghasilkan gula, maksimal atau

tidak, maka disinilah letak keistimewaan pemborongan tebang dan angkut tebu walaupun pekerjaan itu bersifat pemborongan pekerjaan, tetapi pengawasan oleh PT. Indo Lampung Perkasa terhadap pelaksanaan pemborongan pekerjaan tersebut sangat ketat.

Maka kualitas pemborong sebelum diterima oleh perusahaan sebagai kontraktor pemborong pekerjaan sangat menjadi perhatian oleh perusahaan. Tentu tidaklah mudah menjadi kontraktor pemborong tebang dan angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa, pihak perusahaan tidak akan menyerahkan pekerjaan pada pihak yang kualitasnya belum pernah diuji oleh perusahaan dengan dibuktikan pada pekerjaan-pekerjaan yang diborongan sebelumnya oleh perusahaan. PT. Indo Lampung Perkasa tidak akan mempertaruhkan hasil produksi yang selama ini telah dicapai, hanya dengan mempekerjakan kontraktor yang belum teruji kemampuannya oleh perusahaan, disinilah letak performance kontraktor dan kepercayaan perusahaan terhadap para kontraktor sangat besar.

Memang benar secara teoritis setiap pemborongan pekerjaan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, terhadap kerugian apabila pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian, hal

mana biasanya harus dibuktikan melalui proses peradilan. Hal inilah yang oleh perusahaan sangat dihindari.

a. Kontraktor Loose Cane

Kontraktor Loose Cane adalah pemborong pekerjaan pada perusahaan yang hanya mengerjakan tebang tebu saja, kualifikasi yang harus dipunyai adalah tenaga tebang yang cukup, dan tenaga pengawas (ahli) yang cakap, kendaraan angkutan tenaga tebang.

Pekerjaan penebangan tebu termasuk pula mengumpulkan dan pengikatan tebu.

b. Kontraktor Loose Box

Kontraktor Loose Box adalah pemborong pekerjaan pada perusahaan yang hanya mengerjakan pengangkutan tebu saja, kualifikasi yang harus dipenuhi adalah tenaga angkut (supir), tenaga pengawas, dan kendaraan angkutan tebu.

c. Kontraktor Bundle Cane

Kontraktor Bundle Cane adalah pemborong pekerjaan pada perusahaan yang mengerjakan tebang sekaligus angkut tebu, kualifikasi yang harus dipenuhi adalah seluruh kualifikasi yang dimiliki oleh kontraktor Loose Cane dan Loose Box.

#### **4.2.2. Cara Menjadi Pemborong Pekerjaan Tebang dan/atau Angkut Tebu Pada PT. Indo Lampung Perkasa**

Menjadi pemborong pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu (kontraktor) pada PT. Indo Lampung Perkasa, sebagaimana telah diuraikan di atas adalah kontraktor yang biasa menjadi pemborong pekerjaan pada PT. Indo Lampung Perkasa, atau menjadi pemborong dengan jenis pekerjaan yang sama pada perusahaan lain.

Kontraktor sebelum musim tebang dimulai biasanya mengajukan penawaran pekerjaan pemborongan, dengan didahului pemberitahuan oleh perusahaan bahwa akan dimulainya musim tebang untuk tahun yang bersangkutan, pemberituannya biasanya lewat surat kepada masing-masing kontraktor-kontraktor langganannya, atau jika kontraktor itu adalah kontraktor baru maka dengan diketahui informasinya saja dapat pula mengajukan penawaran untuk menjadi kontraktor.

Kemudian masing-masing kontraktor mengajukan penawaran kepada perusahaan dengan melampirkan daftar kualitas dan kuantitas kemampuannya, antara lain :

1. Jumlah tenaga tebang
2. Jumlah tenaga ahli

### 3. Jumlah angkutan

Setelah diterimanya data para kontraktor oleh perusahaan kemudian dilakukan seleksi, untuk menentukan kontraktor mana yang dianggap layak untuk mengikuti tahap penyeleksian selanjutnya.

Tahap selanjutnya adalah tahap pemanggilan para calon kontraktor untuk mengadakan persiapan, yang terbagi dalam beberapa meeting (pertemuan) dengan para kontraktor yaitu :

Meeting I : Evaluasi, seperti pemeriksaan berkas-berkas daftar kualitas dan kuantitas para kontraktor.

Meeting II : Pada pertemuan ini biasanya para kontraktor akan mendapat informasi, layak atau tidaknya ia menjadi kontraktor pada perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan tawar menawar harga borongan pekerjaan, dan kemampuan-kemampuan yang mungkin harus dipenuhi lainnya oleh para kontraktor.

Meeting III : Pemantapan final hasil-hasil pertemuan I dan II, dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja, yang berbentuk surat perintah kerja borongan baik tebang saja (loose cane), angkut saja (loose Box) atau tebang dan angkut secara bersama (Bundle



cane). Kemudian pemberitahuan kapan tenaga tebang dan angkutan harus masuk areal pabrik.

Jadi pada prinsipnya proses terjadinya pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa dilakukan dengan cara negosiasi, alasan cara ini digunakan antara lain kualitas calon pemborong dapat diketahui secara langsung sehingga secara teknis pekerjaannya para kontraktor dapat dipertanggungjawabkan, diperoleh harga yang wajar dan pantas yaitu baik antara Perusahaan (pemilik pekerjaan) dengan pemborong ada kesepakatan harga, dan pada umumnya terjadinya perjanjian pemborongan pekerjaan pada PT. Indo Lampung Perkasa karena para kontraktor yang dipercaya untuk melaksanakan pemborongan tebang dan angkut tebu adalah para kontraktor yang kemampuannya sudah diketahui dan teruji dengan melakukan pekerjaan pemborongan tebang dan angkut tebu pada musim-musim tebang sebelumnya.

Secara teknis pun perundang-undangan tidak mengatur bagaimana proses pemborongan pekerjaan pada sektor swasta harus dilakukan, karena secara finansial dan pertanggungjawaban terhadap resiko dan akibat yang mungkin akan timbul sepenuhnya ditangan pemilik pekerjaan.

#### **4.2.3. Pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Tebang dan/atau Angkut Tebu Pada PT. Indo Lampung Perkasa.**

Pelaksanaan pemborongan dimulai setelah penandatanganan perjanjian pemborongan pekerjaan (biasanya langsung berbentuk Surat Perintah Kerja Borongan) kemudian secara teknis pekerjaan pemborongan dimulai setelah ada perintah secara lisan kepada para pemborong untuk melakukan pekerjaan terhadap tebu-tebu yang harus ditebang dan diangkut, perintah ini bersifat insidentil, seperti hari ini diperintah besok baru mulai dikerjakan atau dapat juga langsung dikerjakan hari itu juga. Ini karena pekerjaan pemborongan tebang tidak termasuk menilai apakah tebu itu sudah layak mutu dan cukup memenuhi standar umur tebang atau tidak, jadi yang menentukan layak atau tidaknya tebu untuk ditebang adalah perusahaan bukan kontraktor. Kontraktor hanya mengerjakan pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu saja, dengan standar pelaksanaan, mutu dan kuantitas tebang-angkut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Tebu sebelum ditebang biasanya dibakar dahulu (untuk tebu bakar), tugas pembakaran hanya boleh dilakukan oleh pihak perusahaan akan tetapi biasanya wajib untuk disaksikan

pemborong yang akan mengerjakan penebangan dan pengangkutan agar diketahui wilayah tebu yang menjadi tanggungan pekerjaannya, hal ini mengingat luasnya areal perkebunan. Untuk pemborongan pengangkutan tebu, biasanya langsung dilakukan secara beriringan dengan proses penebangan, sedangkan untuk tebu hijau biasanya langsung berbentuk perintah kerja karena tanpa melalui pembakaran dimana langsung ditunjukkan oleh perusahaan kepada kontraktor areal mana yang boleh ditebang.

#### **4.2.4. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Tebang dan/atau Angkut Tebu Pada PT. Indo Lampung Perkasa**

Pada musim tebang tahun-tahun yang lalu, antara para pemilik pekerjaan (perusahaan) dengan penerima pekerjaan biasanya, dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Borongan Tebang Angkut atau Perjanjian Kerja Borongan Tebang dimana di dalam perjanjian tersebut diketahui hak dan kewajiban masing-masing, batasan-batasan pemborongan pekerjaan, standar mutu pekerjaan dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Untuk tahun 2004 ini pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa, tanpa melalui pembuatan perjanjian pemborongan tebang dan/atau

---

<sup>29</sup> Dilampirkan dalam tesis ini

angkut tebu sebagaimana tahun-tahun yang lalu, tetapi langsung dilakukan dengan Surat Perintah Kerja Kegiatan Borongan Tebang dan/atau Angkut Tebu, dengan ketentuan dan aturan tidak selengkap pada perjanjian pemborongan tebang dan/atau angkut tebu sebagaimana tahun-tahun yang lalu.

Pihak perusahaan menganggap sesuatu yang telah diketahui dan dipahami bersama tidak perlu di uraikan lebih lanjut di dalam perjanjian. Kemudian faktor saling percaya dan saling menjaga kepercayaanlah yang paling penting daripada bukti formil yang dibuat.<sup>30</sup>

Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan mengapa sesuatu yang biasa diatur dan termaktub dalam perjanjian tidak diatur dan termaktub lagi dalam perjanjian, baik pihak perusahaan maupun para kontraktor seakan membuat gampang setiap persoalan, memang sesuatu yang belum terjadi tidak akan pernah menimbulkan sengketa (kerugian) bagi para pihak, tetapi dengan dibuatnya format perjanjian pemborongan pekerjaan yang baik tentunya, lebih menguntungkan. Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Manager Harvesting PT. Indo Lampung Perkasa

Dalam Pasal tersebut dijumpai asas konsensualisme yang dapat diketahui dalam kata "... perjanjian yang dibuat secara ...". Yang menunjuk pada Pasal 1320 KUH Perdata terutama pada butir ke 1, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dengan asas konsensualisme berarti bahwa perjanjian itu terbentuk atau lahir pada saat tercapainya kata sepakat atau konsensus dari para pihak yang mengikatkan dirinya.

Asas konsensualisme ini kemudian berpengaruh pada bentuk perjanjian, bahwa dengan adanya asas konsensualisme maka perjanjian itu telah lahir atau terbentuk pada saat tercapainya konsensus antara pihak sehingga tidak diperlukan formalitas lain. Akibatnya perjanjian yang terjadi karena adanya kata sepakat tersebut kemudian merupakan perjanjian yang bebas bentuknya, sehingga dapat lisan maupun tulisan.

Asas konsensualisme ini dianut karena menurut Eggens, dalam subekti "suatu tuntutan kesusilaan". Dikatakan bahwa itu merupakan puncak suatu peningkatan martabat manusia. Dengan diletakkan-nya kepercayaan pada perkataan orang. Si orang ini ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya. Di dalam masyarakat sendiri ucapan atau perkataan dapat menjunjung tinggi harga seseorang. Apabila orang dapat dapat dipercaya

perkataannya maka orang lainpun akan menghargainya. Namun bagi hukum yang ingin menyelenggarakan ketertiban dan penegakan keadilan dalam masyarakat, asas konsensualisme itu merupakan suatu tuntutan kepastian hukum.<sup>31</sup>

Hal inilah yang menjadi pedoman bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu baik pihak pemilik pekerjaan (PT. Indo Lampung Perkasa) maupun pemborong pekerjaan. Hal mana menganggap bahwa pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu adalah pekerjaan yang setiap musim dilakukan (rutinitas), baik oleh pemilik pekerjaan maupun oleh pemborong pekerjaan yang itu-itu saja, maka batasan-batasan, hak dan kewajiban masing-masing telah sama-sama diketahui dan disepakati, secara lisan.

Inilah yang dijadikan dasar mengapa untuk musim tebang tahun 2004 ini perjanjian pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu lebih mengedepankan unsur kepercayaan, masing-masing pihak.

Secara yuridis Surat Perintah Kerja Kegiatan Borongan Tebang dan/atau Angkut Tebu, mengatur dan memuat hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Op. Cit, hal 5

1. Judul perjanjian

- b. Menjelaskan bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan  
yaitu sesuai dengan jenis pemborong
- c. Menjelaskan tahun musim tebang

2. Nomor Perjanjian

Menjelaskan nomor perjanjian itu dibuat dan ditandatangani.

3. Kepala perjanjian, yang terdiri dari :

- a. Menjelaskan perintah kepada jenis pemborong tertentu  
untuk melakukan pemborongan pekerjaan

Perintah tidak memuat siapa yang memberi perintah, baik dalam kapasitas dan kewenangannya, tentu ini menimbulkan penafsiran pihak yang memerintah tidak jelas, walaupun diakhir perjanjian ada pihak yang menandatangani dalam kapasitas sebagai pemberi perintah, namun di awal perjanjian yang menjadi pihak pemberi perintah tidak disebutkan. Seharusnya disebutkan siapa yang memberi perintah (memuat identitasnya) kapasitas dan kewenangan apa sehingga ia berhak memberi perintah.

- b. Menjelaskan penerima perintah pemborongan pekerjaan

Yaitu pihak yang menerima perintah (identitas)

- c. Menjelaskan Jenis pekerjaan yang harus dilakukan kepada pembedong untuk musim tebang tahun yang bersangkutan

#### 4. Isi perjanjian

- a. Menjelaskan harga borongan, insentive, penalty.

-Harga borongan merupakan uraian perton dan perhektar baik tebu bakar maupun tebu hijau, yaitu :

1. Pembedong Bundle Cane, menjelaskan harga Dasar dan insentive
2. Pembedong Losse Cane, menjelaskan harga untuk Single Row, Double Row, dan insentive
3. Pembedong Losse Box, menjelaskan harga dasar dan insentive

-Untuk penalty merupakan hukuman akibat wanprestasi yang pengaturannya terbagi :

1. EM (Exstra Losse meter) disebut juga grust

Adalah batasan sampah yang diperbolehkan dalam tebu, yaitu kurang dari 5 %

2. Freshness

Adalah ukuran kesegaran tebu, untuk tahun 2004 ini tidak boleh lebih dari 30 jam. Kesegaran tebu



dihitung dari tebu mulai dibakar hingga diserahkan ke pabrik penggilingan (bakar ke giling).

### 3. Loses/Cane Wastage

Adalah batasan tebu yang boleh tertinggal di areal perkebunan yaitu tidak boleh lebih dari 2 ton perhektar. Adapun uraian batasan itu terbagi, untuk tebu tertinggal kurang dari 1 ton disebut baik, untuk tebu tertinggal antara 1 sampai 2 ton ukuran sedang, dan untuk tebu yang tertinggal diatas 2 ton ukuran jelek, lebih dari 2 ton tebu yang tertinggal inilah merupakan wanprestasi dan dikenakan penalty berupa denda.

Wanprestasi tebu tertinggal di antaranya disebabkan tunggak tebang tebu lebih dari 5 centimeter dari atas permukaan, atau tebu yang tidak terangkut ke pabrik.

#### b. Menjelaskan tentang retensi

Retensi merupakan harga pembayaran yang ditahan pemilik pekerjaan dan dijadikan sebagai jaminan, terhadap pelaksanaan pemborongan pekerjaan yang akan diserahkan

kepada pemborong setelah pekerjaannya selesai. Besarnya retensi adalah 5 % pada setiap pembayaran.

c. Kuota pengiriman

Adalah jumlah tebu yang harus diserahkan pemborong ke pabrik setiap harinya, ketentuan ini berlaku bagi pemborong jenis Bundle Cane, dengan rata-rata perhitungan adalah setiap pekerja yang dimiliki pemborong dianggap mampu menghasilkan 2 sampai 3 ton tebu perhari.

d. Menjelaskan bahwa pemborong harus selalu berada di lokasi kerja, atau dapat menunjuk/mengangkat wakil dengan persetujuan pemilik pekerjaan.

Hal ini bertujuan agar ada pihak yang bertanggung jawab terhadap para pekerja pemborong, mengarahkan, mengendalikan dan selalu siap dengan pekerjaannya yang di bebaskan kepada- nya setiap saat.

e. Menjelaskan tentang kewajiban mentaati peraturan pemborongan tebang dan angkut tebu

1. Mentaati perintah pemborongan untuk melaksanakan pekerjaan setiap saat
2. Mentaati kuota pengiriman tebu yang disanggupinya.

### 3. Mentaati standar mutu terbang.

Ketiganya dalam perjanjian dimaksud tidak dicantumkan tetapi antara pemilik pekerjaan dengan pemborong sudah ada kesepakatan secara lisan tentang standar mutu terbang sesuai dengan pemborongan tahun-tahun yang lalu, hal ini karena pemborong pekerjaan untuk tahun 2004 adalah pemborong-pemborong yang tahun lalu turut serta menjadi pemborong terbang dan/atau angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa, sehingga standar mutu terbang sudah sama-sama diketahui.

- f. Pernyataan bahwa pemborong bertanggung jawab terhadap segala perbuatan para pekerjanya

Adalah segala kerugian yang diderita pemilik pekerjaan akibat perbuatan dari para pekerja pemborong.

- g. Menjelaskan tentang kewajiban-Kewajiban dan larangan lain bagi pemborong antara lain, transportasi para pekerja pemborong, larangan mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur, dan untuk pemborong losse box harus mempekerjakan supir yang berpengalaman dan mempunyai Surat Izin Mengemudi.

- h. Pernyataan pemborong untuk membayar uang jaminan terhadap pelaksanaan pemborongan pekerjaannya.

Sebenarnya jaminan ini tidak dijadikan ukuran untuk menutup kerugian dari perusahaan jika terjadi wanprestasi dari pihak pemborong, akan tetapi lebih mengedepankan bentuk ketaatan administrasi dari pemborong terhadap pemilik pekerjaan. Jaminan ini tidak hanya jaminan satu-satunya pelaksanaan pemborongan pekerjaan tetapi ada juga uang jaminan sebagaimana disebutkan di atas yaitu retensi sebesar 5%.

- i. Waktu pelaksanaan pemborongan pekerjaan

Yaitu waktu hingga batas akhir surat perintah kerja, biasanya berakhir hingga musim tebang tahun yang bersangkutan, atau berakhir karena hal-hal yang menyebabkan diputusnya perjanjian.

- j. Tanggal dibuatnya perjanjian, yaitu untuk di ketahuinya kapan perjanjian itu dibuat.

- k. Penandatanganan kontrak

Perjanjian ditanda tangani setelah ada kesepakatan tentang aturan pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu antara pemilik pekerjaan dan pemborong, atau pemborong

telah mendapat keputusan layak menjadi pemborong pada PT. Indo Lampung Perkasa.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pengaturan tentang tata kerja yang tidak selengkap seperti pada pengaturan tata kerja pada perjanjian tahun yang lalu, didasarkan pada alasan sudah sama-sama diketahui tentang hak dan kewajiban masing-masing, batasan-batasan pemborongan pekerjaan, standar mutu pekerjaan, dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu dimuat dalam perjanjian. Bukankah perjanjian itu dibuat untuk diketahuinya hak dan kewajiban masing-masing, batasan-batasan kerja, dan lain sebagainya itu.<sup>32</sup>

PT. Indo Lampung Perkasa, sebagai pemilik pekerjaan tentunya berharap pelaksanaan pekerjaan tebang dan angkut tebu, oleh kontraktor berjalan sesuai dengan harapan karena hal itu berkaitan dengan proses produksi perusahaan, terganggu atau tidak, padahal secara teknis proses produksi berkaitan dengan tujuan perusahaan (keuntungan), tentu hal ini akan tercapai jika sesuatu yang direncanakan (planer) benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

---

<sup>32</sup> Sumber data dari wawancara dengan Manager Harvesting PT. Indo Lampung Perkasa.

Pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu dengan hanya berdasarkan pada surat perintah kerja dengan ketentuan dan batasan-batasan yang dibuat seminim mungkin (apa yang tertulis), tentu tidak akan menimbulkan akibat apa-apa (kerugian) jika memang pekerjaan pemborongan tebang dan angkut tebu tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini akan berakibat lain jika pelaksanaan pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, tentu penyelesaiannya akan merujuk pada apa yang tertulis dalam perjanjian (surat perintah kerja), dengan ketentuan dan pengaturan yang menjadi tidak jelas dan tegas disebutkan (minim) dalam surat perintah kerja tentunya akan menimbulkan penafsiran sendiri-sendiri jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Tentu hal ini akan menjadi pertanyaan benarkah hal sedemikian ini akan menguntungkan bagi perusahaan jika terjadi perselisihan, atau sebaliknya akan menimbulkan kerugian.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Pengaturan yang tidak jelas dan tegas dalam surat perintah kerja misalnya tidak terdapatnya pengaturan tentang hak pekerja kontraktor di dalam memperoleh tempat tinggal beserta sebahagian kebutuhan hidup (air dan tempat tinggal) selama menjadi pekerja kontraktor dalam pelaksanaan pemborongan tebang dan angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa, ini tentu memberikan penafsiran bahwa hak tersebut tidak ditanggung oleh pemilik pekerjaan, memang pekerja kontraktor adalah pihak ketiga dalam perjanjian pemborongan tebang dan/atau angkut tebu ini, pada musim tebang tahun-tahun yang lalu sebahagian kebutuhan pekerja kontraktor tersebut, selama bekerja sebagai pekerja tebang dan/atau angkut tebu pada kontraktor di PT. Indo Lampung Perkasa menjadi tanggungan dan beban PT. Indo Lampung Perkasa.

Dengan pengaturan tentang batasan-batasan pemborongan pekerjaan yang tidak jelas (tegas) disebutkan dalam surat perintah kerja, dengan alasan sudah sama-sama diketahui (perusahaan dan kontraktor), juga karena biasanya pelaksanaan pemborongan pekerjaan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, tidak dapat dijadikan tolak ukur bahwa perselisihan yang dapat menimbulkan kerugian, dikemudian hari tidak mungkin terjadi (baik bagi perusahaan maupun kontraktor), maka dalam hal ini surat perintah kerja yang sudah dibuat akan menjadi lebih baik jika pengaturan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak tertulis dan tegas disebutkan dalam surat perintah kerja, dengan tujuan jika timbul permasalahan dikemudian hari diharapkan lebih memudahkan dalam penyelesaiannya.

#### **4.3. Tanggung Jawab Penerima Pekerjaan Apabila Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Tebang dan/atau Angkut Tebu.**

Wanprestasi sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab sebelumnya berarti tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti

---

Hal-hal yang tidak diatur secara tertulis dalam perjanjian pada kehidupan modern dewasa sering menimbulkan penafsiran hal tersebut tidak diperjanjikan, artinya tidak perlu prestasi, maka jika terjadi permasalahan ada pihak yang memanfaatkan kelemahan tersebut untuk kepentingannya, karena susahya pembuktian.

yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) jadi diluar kemampuan para pihak.

Untuk menentukan debitur bersalah mealakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi samak sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.<sup>34</sup>

Pelaksanaan perjanjian pembedorongan pekerjaan terbang dan angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa, adakalanya terjadi wanprestasi seperti tidak mencapai target yang telah ditentukan, target dalam hal ini adalah jumlah kuota yang ditentukan kepada masing-masing pembedorongan yang harus dipenuhi untuk setiap

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 205-206



harinya dan juga target waktu yang tidak terlampaui dalam setiap pengiriman tebu.

Jenis pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu memang mempunyai keistimewaan tersendiri dibanding dengan jenis pemborongan pekerjaan lainnya (bangunan misalnya), jika dalam pemborongan bangunan wanprestasi dalam target biasanya berhubungan dengan waktu penyerahan yang terlampaui, maka dalam pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu target disini dapat berbentuk jumlah (kwantitas) tebu yang harus diserahkan dan batasan waktu tertentu yang tidak boleh terlampaui.

Target dalam arti jumlah (kwantitas) tebu yang harus diserahkan sebagaimana kontraktor Bundel Cane ia harus menyerahkan sejumlah 300 ton tebu perhari ke pabrik, kenyataannya ia hanya mampu memenuhi 280 ton tebu perhari, kemudian untuk kontraktor Losse Cane ia harus menyerahkan tebu dengan tingkat kebersihan dari sampah (dalam istilah teknis disebut grust) kurang dari 5 % (lima prosen) dalam pelaksanaannya ia menyerahkan tebu dengan tingkat kebersihan dari sampah 7 % (tujuh prosen), untuk kontraktor angkut tingkat kesegaran tebu (istilah teknis disebut

freshness) kurang dari 30 jam, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata lebih dari 30 jam.<sup>35</sup>

Dari bentuk-bentuk tidak terpenuhinya target tersebut di atas maka berlakulah ketentuan yang sudah biasa diperjanjikan seperti pengurangan target (kuota) tetap sebagaimana yang telah diperjanjikan, penggantian kerugian atau bahkan memutuskan perjanjian.

Bentuk-bentuk tindakan akibat wanprestasi dalam pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu apabila dijabarkan adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan target

Sebagaimana hasil penelitian, target dalam bentuk jumlah (kwantitas) tebu yang harus diserahkan untuk kontraktor Bundle Cane pada PT. Indo Lampung Perkasa rata-rata antara 150 sampai dengan 400 ton tebu perhari. Wanprestasi dalam target jumlah (kwantitas) ini dapat berbentuk tidak mencapai target atau melebihi target.

Untuk wanprestasi berupa tidak terpenuhinya target maka berdasarkan wawancara terhadap dua pemborong Bundle Cane ia langsung dikenakan pengurangan jatah kuota pengiriman

---

<sup>35</sup> Lihat lampiran VI tertanggal 15 Juni 2004 dan 6 sampai 12 Juni 2004 laporan tingkat kesegaran tebu yang dijadikan dasar telah terjadi wanprestasi

tebu, jika sebelumnya dalam perjanjian ia mempunyai kuota 300 ton tebu perhari tetapi dalam pelaksanaannya ia hanya mampu memenuhi 250 ton tebu perhari, maka kekurangan 50 ton tersebut akan langsung diserahkan kepada kontraktor lain yang masih kekurangan dan mampu memenuhi kuota tersebut.

Wanprestasi target jumlah (kwantitas) dalam pengiriman tebu perhari akan akumulasikan selama 7 (tujuh) hari/ satu minggu dan akan dihitung berapa wanprestasi selama satu minggu tersebut, dengan ketentuan tetap menghitung dalam jumlah target perhari, artinya untuk hari yang wanprestasi dalam target tidak dapat diganti dengan hari berikutnya untuk memenuhinya, karena mengingat kapasitas giling pabrik.

Akibat dikurangnya kuota pengiriman tebu perhari akan membawa dampak :

- a. Berkurangnya pendapatan dari hasil pemborongan pekerjaan tebang angkut bagi pemborong itu sendiri. Dampak ini berakibat pada diri pribadi pemborong.
- b. Berkurangnya penghasilan para pekerja kontraktor, karena untuk hari berikutnya ia tidak mendapatkan penghasilan sebagaimana jika kontraktor tempat ia bekerja memenuhi

target seperti hari yang lalu. Dampak ini berakibat pada para pekerja kontraktor.

Jadi akibat dari pengurangan kuota jatah pengiriman tebu perhari tidak hanya berdampak bagi diri kontraktor sendiri, tetapi berakibat juga pada pihak ketiga yaitu para pekerja kontraktor.

Akibat tidak terpenuhinya target pengiriman oleh kontraktor bagi perusahaan adalah :

- a. Perusahaan akan menurunkan kemampuan giling untuk tiap kali terjadi wanprestasi, yang berakibat target gula yang dihasilkan pada hari itu tidak dapat terpenuhi.
- b. Bertambah lamanya waktu musim tebang jika wanprestasi ini sering terjadi.

Dari akibat tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor berakibat pada timbulnya kerugian bagi perusahaan (pemberi pekerjaan) karena secara teoritis hasil yang akan diperoleh perusahaan pada hari itu (gula) tidak tercapai, karena tidak terpenuhinya kuota yang ditentukan oleh perusahaan kepada kontraktor.

## 2. Penggantian kerugian

Untuk wanprestasi berupa melebihi jumlah (kwantitas) tebu yang dikirim perhari oleh para kontraktor dikenakan tindakan berupa pinalty atau hukuman berupa denda, yaitu untuk setiap ton tebu yang melebihi kuota yang telah ditentukan kepadanya, maka kontraktor akan diberikan denda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perton.<sup>36</sup>

Klaim pengganti kerugian akan langsung dipotong pada saat pembayaran harga pemborongan pekerjaan yang telah diselesaikan untuk setiap tujuh hari.

Melebihi target yang telah ditentukan dalam pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu pada PT. Indo Lampung Pekasa merupakan bentuk wanprestasi, alasan ini di dasarkan bahwa target telah ditentukan sebelumnya dengan disesuaikan kapasitas giling pabrik perhari, misalnya kemampuan giling pabrik perhari adalah 6.000 ton tebu, jika pengiriman melebihi kemampuan giling pabrik maka kelebihan tersebut akan menjadi tebu tidak tergiling pada hari yang bersangkutan, yang berakibat menurunkan kualitas rendemen tebu hal ini disebabkan kesegaran tebu berkurang, yang akhirnya mengurangi kemampuan tebu dalam menghasilkan gula.

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Manajer Harvesting, PT. Indo Lampung Perkasa

### 3. Pemutusan perjanjian pemborongan

Maksud dari memutuskan perjanjian pemborongan adalah pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan yang bersifat tetap dan bersifat temporer (tidak tetap), untuk pemutusan perjanjian yang bersifat tetap maka kontraktor beserta para pekerjanya tidak dapat lagi meneruskan pekerjaannya. Hal ini biasanya karena besarnya kerugian yang ditanggung perusahaan atau telah memperoleh dua kali peringatan akibat pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian dan hukuman pengurangan kuota hingga kuota sudah tidak layak lagi untuk dilakukan mengingat besarnya tanggungan kepada para pekerja kontraktor.

Pemutusan yang bersifat temporer (tidak tetap) adalah pemutusan pekerjaan untuk waktu tertentu, pemutusan ini biasanya bersifat hukuman awal atas wanprestasi, kesalahan ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh pemborong pekerjaan dalam hubungan dengan pekerjaan borongannya, akan tetapi terhadap pula para pekerja kontraktor yang melakukan perbuatan merugikan bagi perusahaan, karena segala kerugian pemilik pekerjaan yang ditimbulkan para pekerja pemborong menjadi beban dan tanggung jawab pemborong. Pemutusan yang bersifat

temporer berlangsung antara 3 sampai 7 hari dengan kewajiban segala kebutuhan hidup seluruh pekerjaanya selama kontraktor tidak mendapat pekerjaan menjadi beban dan ditanggung seluruhnya oleh kontraktor.

Sebelum dilakukan pemutusan perjanjian yang bersifat temporer biasanya diawali dengan peringatan yang bersifat lisan maupun tertulis, kemudian pengurangan kuota pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu, apabila tetap tidak mengindahkan maka dilakukan tindakan pemutusan perjanjian yang bersifat tetap.

Setiap melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik pekerjaan pada prinsipnya langsung dikenakan denda, kemudian diikuti dengan tindakan tindakan lainnya sebagaimana tersebut diatas.

Target yang ditentukan dapat pula berupa tidak tepatnya waktu pengiriman tebu ke pabrik penggilingan, oleh kontraktor tebang dan angkut (Bundle Cane) atau kontraktor angkut saja (Loose Box), tidak tepatnya waktu pengiriman secara kontraktual tidak boleh melebihi 30 jam harus sudah masuk dalam pabrik

penggilingan, berdasarkan penelitian terjadi penerimaan tebu di pabrik melebihi 30 jam.<sup>37</sup>

Dari apa yang terjadi tersebut maka kontraktor yang melakukan wanprestasi langsung dikenakan penalty berupa denda yaitu Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap ton untuk pengiriman melebihi 24 jam, denda langsung akan dipotong pada saat pembayaran klaim hasil pekerjaan yang telah di selesaikan setiap satu minggu.

Jumlah nominal denda yang harus dibayar oleh kontraktor secara finansial tidaklah sebanding dengan kerugian yang dialami perusahaan, akibat wanprestasi dari pemborong, menurut hasil penelitian, jumlah nominal bukanlah menjadi ukuran menutup kerugian setiap terjadinya wanprestasi tetapi performance kontraktorlah yang menjadi ukuran layak tidaknya kontraktor itu di pertahankan, juga kemampuan pihak perusahaan (pegawai yang bertugas menjadi pengawas dan penilai pekerjaan para kontraktor) menjadi tolak ukur karir pihak yang bersangkutan, jadi kerugian akibat pekerjaan kontraktor yang tidak sesuai dengan target tidak hanya berakibat pada kontraktor itu sendiri akan tetapi

---

<sup>37</sup> Data diperoleh dari arsip intern PT. Indo Lampung Perkasa, Analisis Burning Cane Of Delivery Daily Report, Week No : 7, Period : 6 Up To 12 June 2004 (Lampiran VI)



berakibat pula pada pihak yang menjadi penanggung jawab proyek pemborongan pekerjaan di PT. Indo Lampung Perkasa.<sup>38</sup>

Telah dijelaskan di atas bahwa keadaan wanprestasi dalam memenuhi target dapat berupa tidak terpenuhi jumlah kuota yang telah ditentukan, keterlambatan waktu pengiriman tebu dan mutu tebang yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, selain diberikan tindakan-tindakan pemberian sanksi dan denda sebagai bentuk tindakan yang dilakukan pemilik pekerjaan telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan. Maka oleh pemilik pekerjaan dilakukan pendekatan-pendekatan secara musyawarah kepada para pemborong sebagai upaya :

1. Agar tidak terulangnya perbuatan yang menyebabkan wanprestasi karena sekecil apapun wanprestasi tentunya tidak hanya kontraktor yang menanggung kerugian (finansial dan performance) tetapi juga perusahaan.
2. Dengan adanya hukuman berupa denda sebenarnya bukanlah bertujuan untuk menutupi kerugian tetapi lebih menunjukkan sebagai tanda telah terjadinya wanprestasi, maka nama baik kontraktorlah yang dipertaruhkan, ia akan lebih terbebani apabila tidak mendapat jatah pekerjaan dalam pemborongan dengan

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Manager Harvesting dan dua orang kontraktor Bundle Cane

menanggung ratusan pekerjaanya dengan karakter yang berbeda dan kerugiannya sendiri jika harus membawa keluar seluruh jumlah kualitas dan kuantitas yang telah ia bawa ke lokasi pabrik, maka biasanya dengan hanya dengan tegoran lisanpun para kontraktor menganggap suatu bentuk hukuman yang besar.

#### **4.4. Upaya-upaya Pencegahan Yang Dilakukan Agar Tidak Terjadi Wanprestasi Dalam Pemborongan Pekerjaan Tebang dan/atau Angkut Tebu.**

Upaya-upaya yang dilakukan agar tidak terjadi wanprestasi, dilakukan baik oleh PT. Indo Lampung Perkasa sendiri maupun oleh para Kontraktor. Pada prinsipnya PT. Indo Lampung Perkasa, telah menerapkan berbagai langkah untuk menekan terjadinya wanprestasi yang mungkin terjadi diakibatkan belum dilakukannya kegiatan panen secara baik dan efisien. Jika upaya menekan terjadinya wanprestasi dilakukan oleh PT. Indo Lampung Perkasa, biasanya berdampak pada intern PT. Indo Lampung Sendiri, yaitu pegawai yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemborongan pekerjaan tersebut akan terhambat karirnya, juga pihak kontraktor, dimana ia akan dikenakan sanksi baik denda maupun pemutusan perjanjian.

Analisa yang dilakukan oleh *Mc Kinsey* terhadap pekerjaan tebang dan angkut tebu tahun 2002 menunjukkan proses ke-giling di seluruh perusahaan di lingkungan Sugar Group Companies, masih menyita waktu yang cukup lama rata-rata 33 jam. Maka untuk musim panen tahun ini, sesuai dengan pedoman yang diarahkan Konsultan Manajemen *Mc Kinsey* pihak Harvesting akan berusaha semaksimal mungkin menurunkan waktu yang digunakan untuk proses bakar ke giling ini menjadi 15 - 20 jam, sehingga jika tercapai langkah ini dapat membuka kesempatan untuk meraih keuntungan yang lebih besar.<sup>39</sup>

Disamping bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana telah disebutkan pada bahasan sebelumnya maka yang dilakukan oleh pemilik pekerjaan untuk meminimalisir agar tidak terjadi wanprestasi antara lain yaitu :

1. Pada musim kering sejauh mungkin jangan ada bakaran tebu sehari sebelum tebang, karena proses pembakaran dan pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu dapat dilakukan pada hari yang sama. Jadi penekanan dilapangan tinggal pada proses pelaksanaan pekerjaan tebang dan angkut tebu yang dikerjakan oleh kontraktor yang harus lebih dimaksimalkan.

---

<sup>39</sup> Info Sugar Gorup Companies, *Op. cit*, hal. 21

2. Sistem yang pertama dibakar harus yang pertama di tebang (*First Burn First Cut*), sistem yang pertama di tebang harus yang pertama diangkut (*First Cut First Take*), proses tersebut akan terlaksana jika kinerja pemborong pekerjaan baik dan efisien, maka tidak hanya pendekatan hukuman yang dikedepankan tetapi pendekatan simbiosis mutualisme (saling bekerjasama yang menguntungkan) yang lebih penting dalam proses ini.
3. Proses penebangan dan pengangkutan harus memperhatikan sekecil mungkin tebu yang boleh tertinggal, yaitu tebang mepet tanah dalam proses tebang ini pihak kontraktorlah yang harus memberikan pengarahan kepada para pekerjanya agar melakukan penebangan maksimal 5 centimeter dari atas tanah, dalam proses meminimalisir tebu tertinggal (*Loses/Cane Wastage*), maka program "*recleaining*" atau pengambilan tebu yang tertinggal lebih dimaksimalkan.<sup>40</sup>
4. Proses penebangan sekecil mungkin mengandung sampah (*grust*), hal ini bertujuan agar proses penggilingan tebu tidak memakan waktu yang lebih banyak dan biaya yang lebih besar, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah bentuk pengawasan yang ketat di lokasi penebangan.

---

<sup>40</sup> *Istilah teknis*, hasil wawancara dengan Manager Umum dan Manager Harvesting

5. Untuk stabilnya proses giling maka kontraktor harus dapat memenuhi kuota hariannya, salah satu caranya adalah para kontraktor angkut harus memuat tebu sesuai berat maksimum gandar truck.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka agar tidak terjadi wanprestasi dalam proses pelaksanaan pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu maka diperlukan :

1. Program "*Bakar Ke Giling*", pada hari yang sama

Dengan program ini maka diharapkan dapat dihindari terjadinya waktu terbuang dalam proses penebangan dan pengangkutan tebu sehingga kualitas rendemen tebu dalam menghasilkan gula tetap terjaga baik.

2. Pemilihan kontraktor yang mempunyai kwalifikasi dan reputasi baik.

Kontraktor yang baik dan berkualitas dengan tenaga kerja yang berkualitas juga diharapkan akan bekerja secara profesional dan sesuai target, sehingga kerugian bagi perusahaan lebih dapat diminimalisir terjadi.

3. Memaksimalkan pengawasan oleh pemilik pekerjaan

---

<sup>41</sup> Data diperoleh dari *Info Sugar Group Compnies*, wawancara dengan Harvesting Manager, dan Kontraktor.

Pengawasan dan penilaian hasil kerja kontraktor oleh pihak intern pemilik pekerjaan sangat menentukan keberhasilan perusahaan juga bagi para kontraktor itu sendiri, karena dengan mendapat predikat kontraktor baik dari hasil penilaian akan menaikkan reputasi dan nama baik kontraktor bagi pemilik pekerjaan.

Pengawasan yang baik juga dapat menekan terjadinya kerugian yang lebih besar akibat pelaksanaan pemborongan pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana.

4. Pemberian sanksi dan denda bagi kontraktor yang wanprestasi

Sanksi dan denda diharapkan menjadi tekanan secara psikologis bagi para kontraktor pelanggar dan kontraktor yang lain agar tidak mengulangi tindakan yang merugikan. Juga sebagai tanda telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan terbang dan/atau angkut tebu.

5. Pemutusan perjanjian

Merupakan tindakan terakhir apabila kontraktor terus melalaikan setiap peringatan-peringatan yang diberikan oleh pemilik pekerjaan akibat tidak terpenuhinya target yang telah ditentukan. Pemutusan pekerjaan dilakukan untuk menghentikan terjadinya wanprestasi selanjutnya.

6. Adanya kesamaan pemahaman tentang ruang lingkup dan batasan-batasan pekerjaan antara pemilik pekerjaan dengan penerima pekerjaan.

Dengan telah diketahuinya batasan-batasan pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak diharapkan wanprestasi tidak akan terjadi karena baik penerima pekerjaan maupun pemilik pekerjaan sudah mengetahui setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan wanprestasi dan setiap perbuatan yang dapat mengurangi terjadinya wanprestasi.

7. Recleaning atau pengambilan tebu-tebu yang tertinggal

Digunakan agar kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi akibat tebu tertinggal tidak terlalu menjadi beban denda bagi penerima pekerjaan, dan juga meminimalisir kerugian pemberi pekerjaan dengan pengambilan kembali tebu-tebu yang tertinggal di areal perkebunan, tindakan ini juga berguna untuk memberi bukti bahwa kontraktor telah melakukan wanprestasi dengan melakukan tebang dan/atau angkut tebu dengan meninggalkan tebu di areal, sehingga dapat memberi contoh untuk pelaksanaan pekerjaan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi.

8. Menjaga hubungan "*simbiosis mutualisme*", bekerjasama yang saling menguntungkan dengan kontraktor

Diharapkan dengan selalu menjaga komunikasi yang baik, antara penerima pekerjaan dan pemberi pekerjaan akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan sehingga diharapkan wanprestasi dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan terbang dan/atau angkut tebu dapat lebih ditekan.

9. Pemutusan hubungan kerja oleh kontraktor terhadap pekerjaanya yang besar kemungkinan menimbulkan wanprestasi.

Ini merupakan tindakan yang biasa diambil oleh para pemborong pekerjaan terbang dan/atau angkut tebu terhadap para pekerjaanya, guna menekan timbulnya wanprestasi, bagaimanapun juga tindakan yang dilakukan pekerjaanya, yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik pekerjaan adalah tanggung jawabnya.

10. Pelaksanaan hak kontraktor oleh pemilik pekerjaan dengan baik.

Hal ini dimaksudkan setelah kontraktor melakukan kewajiban dengan baik, pihak pemilik pekerjaan sudah seharusnya memberikan hak kontraktor dengan baik pula, karena hal ini tidak hanya menyangkut diri kontraktor itu sendiri juga menyangkut para pekerja kontraktor. Dengan harapan para kontraktor akan bekerja lebih baik dan menekan timbulnya wanprestasi.



Keberhasilan perusahaan dalam memproduksi secara maksimal sebagian ditentukan oleh kontraktor dalam melaksanakan pemborongan pekerjaannya, kontraktor yang mempunyai kualifikasi dan reputasi baik diharapkan mampu bekerja maksimal dan memenuhi target yang dibebankan.

Pada prinsipnya meminimalisir kemungkinan wanprestasi agar tidak terjadi kerugian, dapat dilakukan baik oleh kalangan intern PT. Indo Lampung Perkasa sendiri maupun oleh pihak kontraktor. Pemilik pekerjaan beranggapan bahwa mencegah agar tidak terjadi wanprestasi dan menimbulkan kerugian lebih penting daripada menuntut pihak lain untuk menutupi kerugian akibat perbuatannya. Alasan ini berdasarkan pada pembedaan, bahwa pemborongan pekerjaan terbang dan/atau angkut tebu mempunyai jenis pekerjaan dan karakteristik yang berbeda dengan pemborongan pekerjaan lainnya, yaitu :

1. Sistem pemborongan pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemborong dalam melakukan semaksimal mungkin pekerjaannya akan tetapi juga kemampuan perusahaan dalam mengolah hasil pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh para kontraktor hingga menjadi gula.

Tentu tidak efisien kemampuan para kontraktor yang sangat maksimal dalam melakukan pemborongan pekerjaannya hingga menghasilkan kiriman tebu yang besar akan tetapi perusahaan tidak mampu mengimbangi dengan kemampuan (kapasitas) giling perhari yang kecil.

Juga sebaliknya tidak efisien kemampuan giling perhari perusahaan yang besar tidak diimbangi dengan kuota kiriman tebu yang mencukupi.

Kemudian besarnya kiriman tebu juga tidaklah maksimal dalam menghasilkan gula jika proses penebangan dan pengangkutan tidak memenuhi standar mutu yang baik.

2. Berhasil atau tidaknya pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu tidak ditentukan pada saat diterimanya tebu di pabrik penggilingan tetapi pada saat tebu di olah agar menghasilkan gula yang maksimal, hal-hal yang terkait dengan maksimal atau tidaknya tebu menghasilkan gula antara lain ditentukan proses penebangan dan proses pengangkutan yang baik.

#### **4.5. Tanggung Jawab Penerima Pekerjaan Apabila Terjadi Suatu Keadaan Di Luar Kemampuan**

Diluar kemampuan (*Force Majeure*) berhubungan dengan resiko yang akan terjadi dan kerugian diluar kemampuan pihak kontraktor. Dalam pemborongan pekerjaan *force majeure* menyebabkan tidak dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sehingga pihak pemilik pekerjaan mengalami kerugian.

Hal-hal yang dapat dikategorikan keadaan *force majeure* dan biasa terjadi dalam pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu adalah pada saat hujan dan mekania.

Pada saat hujan pekerjaan pemborongan menjadi terhambat dalam memenuhi kuota dan waktu yang ditentukan, karena tidak dapat dilaksanakannya proses penebangan dan pengangkutan tebu, walaupun dapat tentu tidak maksimal, bahkan oleh perusahaan ada larangan bagi pemborong pekerjaan untuk melakukan pengangkutan pada saat hujan karena areal akan menjadi rusak jika dilewati truk pengangkut tebu karena basah. Akibatnya proses produksi pada hari itu akan terganggu bahkan tidak dapat dilakukan karena tidak ada tebu yang digiling, hal ini tentu menyebabkan kerugian.

Bagi pihak pemborong juga mengalami kerugian dengan tidak dapat dilakukannya proses penebangan dan pengangkutan tebu karena hujan, pada hari itu ia tidak memperoleh penghasilan borongan pekerjaan yang maksimal, tentunya pekerja para kontraktor tebang dan angkut juga tidak memperoleh penghasilan.

Jadi pada prinsipnya kerugian tidak dapat dilakukannya pemborongan pekerjaan tebang dan angkut tebu dalam keadaan *force majeure* tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemilik pekerjaan (PT. Indo Lampung Perkasa) akan tetapi juga pada penerima pekerja (kontraktor) bahkan para pekerja kontraktor (pihak ketiga).

Agar tidak terhentinya proses produksi pabrik pada hari hujan, yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian perusahaan, biasanya perusahaan dengan cara negosiasi melakukan musyawarah dengan para kontraktor untuk melangsir tebangan tebu ke jalan hingga dapat dijangkau oleh angkutan (truk) dan dibawa ke pabrik. Walaupun tidak maksimal akan tetapi dapat meminimalisir kerugian perusahaan dan juga dengan tetap adanya pekerjaan pihak pemborong pekerjaan dan para pekerjanya tetap memperoleh pendapatan.

Mekania merupakan istilah teknis untuk menyebut banyaknya rumput yang menjalar sehingga proses penebangan tidak dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu karena tingkat kesulitan menjadi lebih tinggi, mekania tidak dapat di prediksi sebelumnya karena biasanya terdapat ditengah areal perkebunan tebu.

Mekania menyebabkan target pemborongan pekerjaan tebang tidak dapat dipenuhi sesuai dengan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan, karena kapasitas produksi menjadi menurun, untuk meminimalisir kerugian pihak perusahaan biasanya mengambil tindakan negosiasi dengan para kontraktor untuk tetap mau melaksanakan pekerjaan tersebut tetapi biasanya kontraktor mengajukan penawaran untuk pemberian harga borongan yang lebih dari pemborongan biasanya.

Jadi dapat dikatakan apabila terjadi force majeure kerugian yang ditimbulkan tidaklah menjadi beban dan ditanggung oleh pemborong pekerjaan tebang dan angkut tebu, malahan tetap dapat diminimalisir kerugian tersebut dengan melakukan musyawarah kepada para kontraktor untuk tetap mengupayakan pemborongan pekerjaan dilaksanakan, walaupun pihak kontraktor tetap tidak mau melaksanakan pemborongan pekerjaan dengan alasan tidak ekonomis, artinya biaya yang dikeluarkan dalam proses penebangan

dan pegangkutan lebih besar daripada harga borongan pekerjaan maka tidaklah menjadi sebab kerugian perusahaan akibat force majeure, menjadi beban dan ditanggung oleh kontraktor karena kerugian tersebut diluar kesalahan pemborong pekerjaan

Karena force majeure hanya bersifat temporer (tidak tetap), maka apabila keadaan diluar kemampuan tersebut telah berubah (hujan sudah reda) dan areal perkebunan sudah kering maka pekerjaan harus segera dilaksanakan dan target yang harus dipenuhi tetap mengikat dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggungjawab Penerima Pekerjaan Apabila Wanprestasi Dalam Pemborongan Pekerjaan Tebang dan/atau Angkut Tebu.

Wanprestasi dalam perjanjian pemborongan tebang dan/atau angkut tebu dapat berupa jumlah/kwantitas (target) tebu yang harus diserahkan dan waktu tertentu yang tidak boleh terlampaui, jika kedua hal tersebut dilanggar maka akan dikenakan :

- a. Pengurangan target

Yaitu jumlah tebu yang harus ditebang atau diserahkan setiap harinya akan dikurangi sesuai dengan jumlah target yang tidak dipenuhinya dengan akumulasi setiap tujuh hari kerja.

- b. Penggantian kerugian

Yaitu penggantian kerugian akibat melebihi target yang telah ditentukan, karena hal ini berhubungan dengan kapasitas giling pabrik setiap harinya.

Jika melebihi target maka sisa tebu yang tidak tergiling pabrik akan berkurang kualitas rendemen tebunya dalam menghasilkan gula, hal inilah yang biasanya dikenakan denda.

c. Pemutusan perjanjian pemborongan

Pemutusan perjanjian pemborongan tebang dan/atau angkut tebu dapat bersifat tetap dan temporer, untuk yang bersifat tetap maka kontraktor beserta pekerjaanya tidak dapat lagi meneruskan pekerjaannya. Sedangkan untuk pemutusan perjanjian yang bersifat temporer adalah pemutusan pekerjaan untuk waktu tertentu, pemutusan ini biasanya adalah hukuman awal akibat wanprestasi.

Disamping akibat tidak terpenuhinya target yang telah ditentukan, berakibat pada penerima pekerjaan (kontraktor) saja, sebenarnya berakibat pula pada pihak-pihak tertentu di dalam perusahaan (penerima pekerjaan), karena hal ini berarti pihak yang diberi kewenangan oleh perusahaan untuk menangani pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu lemah dalam pengawasan, hal ini akan berpengaruh pada karir orang tersebut di dalam perusahaan, disamping itu berakibat juga bagi pihak ketiga yaitu para pekerja kontraktor, karena jika terjadi



pengurangan kuota atau bahkan pemutusan pekerjaan maka para pekerja tidak akan mendapat pekerjaan lagi yang berarti tidak akan mendapat penghasilan.

2. Upaya-upaya yang dilakukan agar tidak terjadi wanprestasi dalam pemborongan pekerjaan terbang dan/atau angkut tebu.

Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan baik oleh pihak pemilik pekerjaan sendiri (PT. Indo Lampung Perkasa) maupun oleh pihak penerima pekerjaan (para Kontraktor), yang apabila dirinci tindakan tersebut dapat berupa :

- a. Program "*Bakar ke Giling*" dilakukan pada hari yang sama
- b. Pemilihan kontraktor yang mempunyai kualifikasi dan reputasi baik
- c. Memaksimalkan pengawasan oleh pemilik pekerjaan
- d. Pemberian sanksi dan denda bagi kontraktor yang wanprestasi
- e. Pemutusan perjanjian
- f. Adanya kesamaan pemahaman tentang ruang lingkup dan batasan-batasan pekerjaan antara pemilik pekerjaan dengan penerima pekerjaan
- g. Program "*recleaning*" agar lebih ditingkatkan

- h. Menjaga hubungan "*simbiosis mutualisme*", bekerjasama yang saling menguntungkan
  - i. Pemutusan hubungan kerja oleh kontraktor dengan para pekerjanya yang besar kemungkinan menimbulkan wanprestasi
  - j. Pelaksanaan hak kontraktor oleh pemilik pekerjaan dengan baik
3. Tanggungjawab penerima pekerjaan apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan terbang dan/atau angkut tebu.
- Diluar kemampuan disini berarti diluar kemampuan manusia yang tidak dapat di perkirakan sebelumnya sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (pemilik pekerjaan). Kerugian yang timbul akibat diluar kemampuan dalam pemborongan pekerjaan terbang dan/atau angkut tebu ini tidaklah menjadi beban dan ditanggung oleh penerima pekerjaan, artinya ia di bebaskan untuk menanggungnya. Malahan dalam keadaan tertentu pihak pemilik pekerjaan biasanya melakukan negosiasi ulang harga borongan pekerjaan yang telah disepakati, agar penerima pekerjaan tetap mau melaksanakan pemborongan pekerjaan yaitu dengan menaikkan harga tawar borongan

pekerjaan, hal ini disebabkan agar kesinambungan proses giling pabrik tetap terjaga yang tentunya apabila diperhitungkan secara ekonomis akan lebih besar kerugiannya apabila pabrik berhenti giling untuk hari yang bersangkutan, daripada memberikan penawaran lebih dari pada harga borongan biasa.

## 5.2. Saran

Dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan dan kekurangan sebagai manusia biasa, penulis mencoba memberikan sedikit saran-saran yang kiranya dapat berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan tebang dan/atau angkut tebu pada PT. Indo Lampung Perkasa :

1. Agar pihak PT. Indo Lampung Perkasa dapat membuat format perjanjian pemborongan pekerjaan tebang dan/atau angkut tebu yang baik, yang dapat dijadikan landasan (bukti) apabila dikemudian terjadi sengketa, dan tidak menimbulkan penafsiran hukum yang bermacam-macam.
2. Dengan hanya mendasarkan pada sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas setiap musim tebang dan/atau angkut tebu tidaklah baik untuk dijadikan alasan mengesampingkan, alat pembuktian dan batasan ruang lingkup masing-masing pihak

baik pemilik pekerjaan maupun penerima pekerjaan dalam pemborongan pekerjaan terbang dan/atau angkut tebu, secara tertulis dan diketahui bersama.

3. Pihak ketiga dalam pemborongan pekerjaan terbang dan/atau angkut tebu (pekerja kontraktor), agar lebih menjadi perhatian bersama baik keselamatan kerja maupun penghargaan sebagai manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Kontrak Pemborongan Mega proyek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hanitijo Soemtro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta. 2003.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2003.
- Info Sugar Group Companies, *Spectacular Project Menuju 10 Ton Gula Per Hektar*, Nomor 01, Edisi Oktober – Desember 2003, Sugar Group Companies, Bandar Lampung, 2003.
- Masjchun Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Meliala, A. Qirom Syamsudin, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Jogjakarta, 1985
- Mubyarto, *Masalah Industri Gula Di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 1984
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

- Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung 1987.
- Soekanto, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984.
- Soekardono, R, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta. 1983.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 1985
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1975
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1995.